EDISI 71 / 2022

EDUKASI KEUANGAN

UMKM NAIK KELAS

Menjaga Momentum Penguatan Tulang Punggung Ekonomi

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	18
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	27
KOMUNITAS	40
CERITA ALUMNI	43
KESEHATAN	47
POINT OF INTEREST	48
GALERI	52

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI
Sugeng Satoto

REDAKTUR
Tri Budi Murwanto
Amir Abdulhajji
Rachmatunnisya
Arif Mulia
Hestin Parmawati
Rita Dwi Lindawati
Iki Rizal Apriandi
Rio Suareski
Sri Wahyuni
Fajar Prasetyo Yuwono
Yuniyati Syarifah
Bambang Kismanto
Andita Trias Nur Azizah
Jumali
Agung Darono
Puspa Paradisa Puteri H.
Agung Nugroho Kurnianto
Achmad Zunaidi
Gunawan
Inwan Hadiansyah
Primandita Fitriandi
Yohana Tolla

EDITOR
Abdul Aziz Maghfur
Arimbi Putri
Klemens Amy Novianto
Luqman Hakim

DESAIN GRAFIS
Ivan Rizki Arviandi

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.
Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.
Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
http://www.bppk.kemenkeu.go.id

SALAM REDAKSI

Krisis ekonomi yang dialami pada 1997 sangat berbeda dengan krisis yang dialami pada saat pandemi sejak 2020 lalu. Salah satu yang membedakannya adalah sektor non formal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada krisis 1997 dianggap sebagai peredam perekonomian (shock absorber). Sedangkan pada masa pandemi, sektor non formal dan UMKM justru yang terkena dampak pertama, langsung, dan utama yang disebabkan adanya berbagai pembatasan sosial.

Liputan Utama pada Majalah Edukasi Keuangan kali ini akan mengupas sudut pandang UMKM terhadap terpaan wabah Covid-19 yang sudah hampir tiga warsa menggerogoti usaha mereka. Tak hanya Liputan Utama, rubrik Profil pun akan menilik sosok inspiratif pegiat UMKM dari Kementerian Keuangan, Chairul Saleh.

Liputan Khusus Majalah Edukasi Keuangan edisi 71 memaparkan kondisi pembelajaran mutakhir dari BPPK, salah satunya adalah Pembelajaran TerintegrasiKU, dari Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU). Apa saja yang membedakannya dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya? Simak pada rubrik Liputan Khusus ini.

Pembatasan sosial di masa pandemi nampaknya tak menyurutkan langkah insan-insan Kemenkeu untuk bersosialisasi dengan sesama pegawai dan bahkan masyarakat. Rubrik Komunitas akan selalu menghadirkan profil sekumpulan individu Kemenkeu yang bergeliat di satu peminatan bersama. Untuk edisi kali ini, Komunitas Literasi Julukana (Kolina) akan menghiasi jendela informasi Anda.

Tak ketinggalan sebagai hidangan penutup, selalu disajikan sesuatu yang manis dan menyegarkan. Ialah rubrik Galeri dan Point of Interest dari manisnya alam dan wisata di sekitar Balai Diklat Keuangan, dapat Anda cicipi di setiap edisi kami.

Seluruh sajian majalah ini pastinya wajib Anda santap untuk menambah penuh hari-hari Anda. Selamat membaca, dan selamat menikmati "sajian nikmat" dari Majalah Edukasi Keuangan.

BPPK PERTAHANKAN CAPAIAN PPID TINGKAT I KEMENKEU KATEGORI INFORMATIF

Kamis, 4 Agustus 2022. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik melalui Youtube Kemenkeu RI.

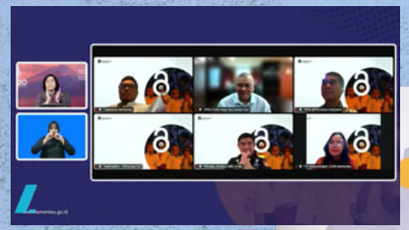

BPPK SAPU BERSIH GELAR JUARA KOMPETISI PENGEMBANGAN MATERI MICROLEARNING LAN AWARDS 2022

Selasa, 9 Agustus 2022. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih seluruh gelar juara tiga besar pada Kompetisi Pengembangan Materi Microlearning LAN Awards 2022. Penyerahan penghargaan diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara hybrid sekaligus dalam rangka memperingati HUT LAN RI ke-65 yang tiba pada bulan Agustus 2022.

BPPK, BKF, DAN SETJEN SIARKAN SECARA LANGSUNG FINAL KOMPETISI SEPAK BOLA KEMENKEU SATU 2022

Jumat, 12 Agustus 2022. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu menyiarkan secara langsung pertandingan final Kompetisi Sepak Bola Kemenkeu Satu melalui channel Youtube dan Zoom Meeting. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan turut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) beserta jajaran dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77.

LINTAS PERISTIWA
JULI-AGUSTUS

TEKS:
LUQMAN HAKIM
FOTO:
DOKUMENTASI BPPK

LOKER EPISODE 37 EDISI SPESIAL: KICK OFF KLF 2022

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Learning Organization Knowledge Room (LOKeR) Episode 37 secara hybrid di Aula Gedung B Sekretariat BPPK. LOKeR episode kali ini merupakan edisi spesial karena sekaligus bertepatan dengan launching penyelenggaraan Kemenkeu Learning Festival (KLF) 2022.

BPPK GELAR ACARA PUNCAK PERINGATAN KEMERDEKAAN RI KE-77

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menggelar Acara Puncak Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 yang berlangsung secara hybrid di Aula Gedung B Sekretariat BPPK. Acara ini diisi dengan berbagai performance berupa tarian Sabda Nusa PKN STAN, medley Pusdiklat Keuangan Umum, stand up comedy dari BDK Yogyakarta, dan persembahan beberapa lagu baik dari FOC Band maupun BDK lainnya turut memeriahkan semarak kemerdekaan ini. Pemotongan tumpeng menjadi penutup dari rangkaian acara puncak tersebut.

BPPK TERIMA VISITASI TIM ASSESSOR LAN

Senin, 22 Agustus 2022. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menerima visitasi oleh Tim Assessor Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Jumat (19/8) lalu. Kegiatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian re-akreditasi BPPK selaku Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan di bidang Keuangan Negara.

ELVIRA ANDRIYANI

GELIAT UMKM DI ERA *NEW NORMAL*

"Yah.. memang sulit *mbak*, terpaksa harus *mulangin* beberapa pekerja ke kampung", sambil terus memindahkan potongan-potongan kayu dari atas rak ke depan toko, lelaki itu terus bercerita. "Sebenarnya anak-anak buah saya tidak mau pulang ke kampung, tapi saat itu orderan *anyep*. Kayu-kayu yang ada di gudang sudah saya jadikan meja dan kursi yang biasanya cepat *laku*. Mau *nyetok* kayu lagi, *gak* berani *mbak*, *lha wong* meja dan kursi yang sudah jadi *aja gak* keluar-keluar dari toko". Tidak lama kemudian, lelaki pra lansia itu duduk di hadapan kayu-kayu yang sudah dijajarkannya, siap untuk mengamplas. Namun sejenak alisnya berkerut, matanya menatap nanar ke deretan meja berwarna coklat yang sudah dijemurnya sedari pagi.

Pak Marhani namanya. Dia pemilik pengolahan mebel rumahan di daerah Jakarta Timur, Marhani Furniture, yang dibangunnya sejak tahun 2005 silam. Pak Marhani masih ingat betul bagaimana perjuangannya selama 2 tahun terakhir, mempertahankan usaha mebel demi keluarga dan para pekerjanya.

UMKM DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 yang muncul di tengah-tengah kita sejak awal tahun 2020 memang telah memunculkan berbagai masalah yang cukup pelik. Mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga nyawa, terenggut dari banyak korban yang tidak bisa bertahan. Masyarakat pun kesulitan untuk menjaga kehidupan dan penghidupannya agar tetap sehat. Salah satu golongan masyarakat yang paling terdampak dari pandemi ini adalah kelompok sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebelum pandemi terjadi, Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan pertumbuhan jumlah UMKM. Di tahun 2019, jumlah UMKM naik sebesar 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 64,19 juta pelaku UMKM di tahun 2018, terdapat peningkatan menjadi 65,47 juta pelaku di tahun 2019. Dengan jumlah

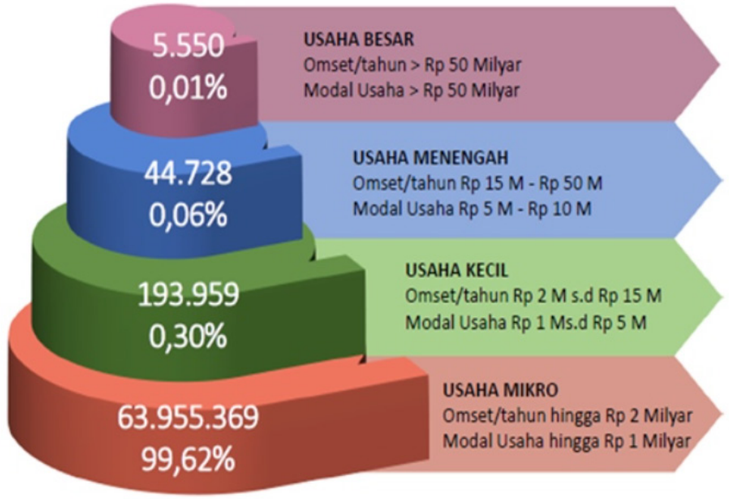

Gambaran UMKM Indonesia
Sumber: https://kemenkopukm.go.id/; 2022

sebanyak itu, UMKM memiliki proporsi 99,99% dari jumlah unit usaha dan menyerap 96,9% tenaga kerja sektor usaha yang ada di Indonesia. UMKM bahkan memberikan kontribusi sebesar 60,5% bagi Produk Domestik Bruto Nasional. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa UMKM memiliki peran yang sangat siginifikan bagi perekonomian bangsa ini.

Akan tetapi ketika pandemi Covid-19 terjadi, sektor UMKM di Indonesia merasakan dampak yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah pendapatan UMKM menurun drastis. Hal tersebut mengancam terjadinya krisis ekonomi bagi masyarakat, mengingat UMKM menjadi sektor yang menggerakkan ekonomi nasional dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang sangat besar dalam 20 tahun terakhir.

Di triwulan II tahun 2020, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI melakukan Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia. Survei ini ditujukan agar pemerintah dan para pelaku usaha mampu mendapatkan gambaran mengenai dampak pandemi pada UMKM sedini mungkin dan mendapatkan cara untuk menjaga produktivitas UMKM selama pandemi. Survei yang melibatkan 679 pelaku UMKM tersebut menghasilkan temuan bahwa 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan. Hampir separuh usaha mengalami penurunan penjualan lebih dari 75%, terutama bagi UMKM yang berumur tidak lebih dari 5 tahun. Di sisi lain, biaya usaha justru mengalami peningkatan, mulai dari harga bahan baku, biaya transportasi, hingga upah dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan melihat persepsi ketahanan UMKM di masa pandemi, survei ini meramalkan 70-80% UMKM akan gulung tikar di tahun 2020.

Sementara itu, UNDP dan LPEM UI juga mengadakan survei terhadap 1.180 para pelaku UMKM di masa pandemi, yang memberikan hasil senada dengan survei LIPI. Survei ini menunjukkan 77% UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 88% UMKM mengalami penurunan permintaan dari konsumen. Lebih dari 48% UMKM bahkan mengalami kesulitan bahan baku. Hampir seluruh responden juga menyatakan adanya penurunan nilai aset akibat pandemi. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, masalah yang dialami oleh UMKM di awal pandemi ini disebabkan oleh perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat secara tiba-tiba akibat pandemi, permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku produksi.

Bagi UMKM, dampak pandemi bertolak belakang dengan krisis moneter tahun 1998. Pada krisis moneter 1998, UMKM benar-benar berhasil menjadi penyelamat ekonomi nasional. Jumlah UMKM meningkat 350% di saat usaha-usaha besar berjatuhan. UMKM mampu menyerap ribuan tenaga kerja dan membantu peningkatan perekonomian nasional. Namun Covid-19 memberikan cerita yang berbeda, dimana justru UMKM berguguran dan merumahkan banyak tenaga kerja. Melihat pukulan yang begitu besar bagi UMKM selama pandemi, pemerintah menyadari betul bahwa UMKM membutuhkan dukungan agar dapat bertahan.

PERJUANGAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI

Berbagai upaya telah dilakukan sendiri oleh UMKM selama masa pandemi. Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kala pandemi menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut dibaca oleh para pelaku UMKM, hingga menyediakan layanan pesan antar. Cara ini banyak dipilih oleh bisnis UMKM di bidang kuliner, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan layanan pesan antar, masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Dari sisi UMKM sendiri, layanan pesan antar menjaga omzet dan penjualannya agar tidak turun terlalu jauh.

Cara lain yang dilakukan oleh UMKM adalah melakukan penjualan secara digital. Berbagai jenis bisnis di bidang busana, produk kreatif, kecantikan, jasa, hingga

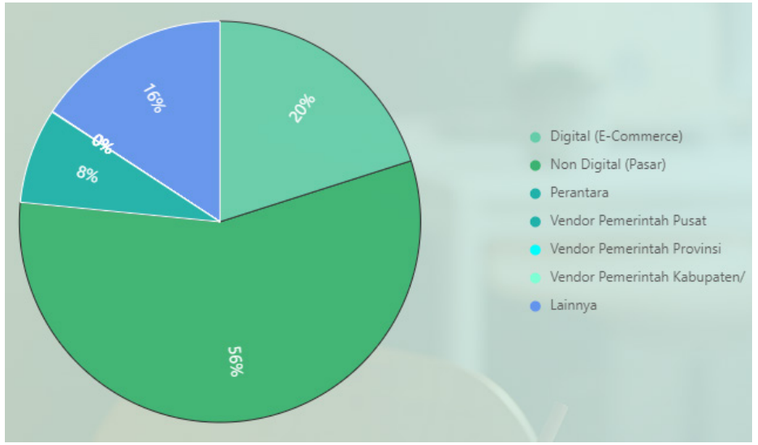

Metode Pemasaran UMKM 3 tahun terakhir (tahun 2020-2022)
Sumber: https://satudata.kemenkopukm.go.id/; 2022

pendidikan, telah merambah dunia digital sebagai sarana pemasarannya. *E-commerce* pun semakin marak dan berbagai *marketplace* mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak dapat dipungkiri, masa PSBB membuat digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting.

Akan tetapi, digitalisasi UMKM bukan tanpa kendala. Di beberapa daerah terpencil, akses internet masih sangat terbatas. Selain itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi dan pasar digital pun masih minim. Ditambah dengan banyaknya penipuan dalam transaksi jual beli *online,* konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan pembelian secara digital.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, 5 sektor utama UMKM terlihat membutuhkan bantuan peningkatan SDM digital dan infrastruktur internet. Untuk itu, perlu dibangun infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung digitalisasi UMKM agar mampu memasarkan produknya secara daring.

UPAYA PEMERINTAH DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam memajukan UMKM dan menjaga geliat UMKM di tengah pandemi. Berbagai cara dilakukan untuk membantu UMKM agar mampu melewati pandemi, mulai dari sisi regulasi hingga peluncuran bantuan bagi UMKM. Dari sisi regulasi misalnya, pemerintah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga 64,13 juta UMKM yang masih beroperasi di sektor informal agar terdorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Untuk mengatasi kendala dalam perizinan usaha yang rumit dengan banyaknya aturan di pusat dan daerah, pemerintah mengatur kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui UU Cipta Kerja agar UMKM dapat terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya.

Selain dari sisi regulasi, pemerintah memberikan bebeapa bantuan bagi UMKM seperti peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program PEN merupakan salah satu program pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, sebagai respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat, khususnya sektor informal atau UMKM. Kementerian Investasi/BKPM merinci beberapa program PEN yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu subsidi bunga/margin, belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan *loss limit* kredit UMKM, penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM, hingga program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Selain PEN, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui lembaga keuangan. Bantuan ini diberikan dengan pola penjaminan, dimana suku bunga kredit disubsidi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat modal UMKM melalui pembiayaan.

No	Sektor	Bantuan SDM Kemampuan Digital	Bantuan Infrastruktur Internet
1	Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan	5,91%	5,23%
2	Industri Pengolahan	11,05%	9,51%
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	11,99%	11,18%
4	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10,92%	12,38%
5	Pengangkutan, Pergudangan, dan Jasa Lainnya	18,86%	16,37%

Kebutuhan Bantuan SDM dan Infrastruktur Digital UMKM
Sumber: https://www.kominfo.go.id/; 2022

Untuk membantu pemasaran, pemerintah melakukan pencanangan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN *Online Sale Day* (AOSD). Gernas BBI diluncurkan pada tahun 2020 untuk mendorong *national branding* dari produk-produk lokal unggulan. Sementara AOSD atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan kegiatan belanja daring secara serentak di *platform* digital sepuluh negara ASEAN. AOSD juga dilaksanakan sejak tahun 2020, tepatnya setiap hari ulang tahun ASEAN di tanggal 8 Agustus. Kedua inisiatif ini diambil oleh pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM agar bergabung ke *platform* digital. Dengan demikian, diharapkan UMKM mampu meningkatkan jumlah serta produktivitasnya sehingga dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri tidak tinggal diam dalam berkontribusi mendorong digitalisasi UMKM. Di bulan April tahun 2022, program Kemenkeu Satu berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi para pelaku UMKM. Dalam bazar tersebut, Kemenkeu memberikan edukasi/sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan masyarakat, terkait bisnis, ekonomi, dan lelang yang bisa diikuti oleh UMKM untuk meningkatkan penjualan.

Selanjutnya dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI bertema "Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM" yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022, Menteri Keuangan mengatakan bahwa digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan, termasuk di dalamnya bagi pemasaran digital UMKM. Untuk mendorong akses pembiayaan dan digitalisasi bagi UMKM, Kementerian Keuangan memberikan UMKM *Financing Empowerment* (U-Fine), sebuah program yang memungkinkan UMKM untuk mengajukan permohonan kredit program pemerintah secara daring. Kementerian Keuangan juga mengembangkan pasar *digipay*, sebagai dukungan terhadap pemberdayaan UMKM melalui *digipay marketplace*, serta berupaya menyediakan *big data* sebagai sumber informasi bagi UMKM untuk menganalisis pasar sehingga mampu mengembangkan produk dan layanannya.

UMKM DI ERA *NEW NORMAL*

Di tahun 2022 ini, Indonesia telah memasuki era *New Normal* pasca pandemi Covid-19. UMKM yang mampu bertahan selama pandemi mulai menunjukkan geliat usaha dan menata kembali bisnisnya. Di samping itu, UMKM baru pun banyak bermunculan. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2022, ada lebih dari 50 ribu pendaftaran baru pelaku UMKM yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas untuk sektor UMKM yang disediakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pun melebihi target yang disasar.

Bahkan di salah satu kegiatan unggulan pemerintah provinsi DKI Jakarta bagi UMKM, yaitu Jumat Beli Lokal (JBL), terlihat terjadinya lonjakan omzet UMKM pasca pandemi. JBL adalah kegiatan pameran daring produk unggulan UMKM di DKI Jakarta melalui *platform* belanja digital Dinas PPKUKM untuk mendorong pemasaran produk UMKM Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, omzet penjualan UMKM DKI Jakarta meningkat secara signifikan, dari Rp380.000.000 di tahun 2021 menjadi Rp1.913.416.073 di tahun 2022 pasca pandemi.

Dari sisi lapangan usaha, roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Q3 tahun 2022 ada di angka 5,72% (yoy). Angka tersebut menguat dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya dan masa-masa awal pandemi. Pencapaian ini menjadi gambaran penguatan pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan kinerja perekonomian ini selaras dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran menurun. Kurang lebih 4,25 juta tenaga kerja berhasil diserap dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

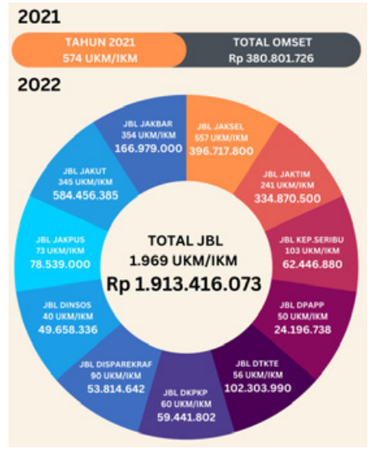

Penjualan Daring UMKM DKI Jakarta melalui Kegiatan JBL
Sumber: https://disppkukm.jakarta.go.id/; 2022

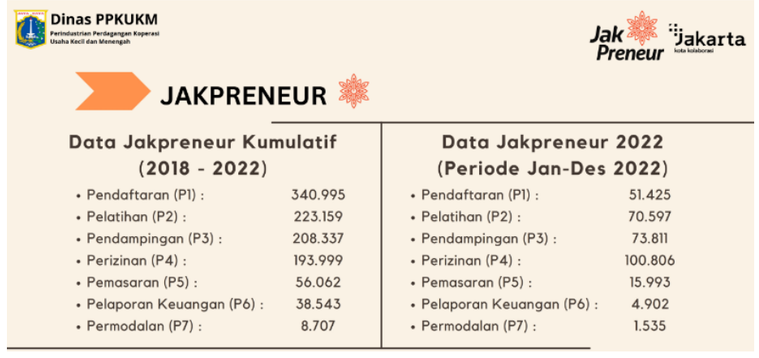

Peningkatan Pelaku UMKM di DKI Jakarta Pasca Pandemi
Sumber: https://disppkukm.jakarta.go.id/; 2022

Dengan mulai pulihnya UMKM, pemerintah menyusun kembali program-program strategis yang ditujukan untuk memperkuat UMKM. Program PEN sebagai bantuan pemulihan di masa pandemi tidak lagi dilanjutkan, karena Indonesia akan bertransisi ke kondisi endemi. Keputusan ini tentu diambil dengan berbagai pertimbangan dengan melihat geliat pemulihan ekonomi nasional dan dunia usaha yang semakin kuat. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengawal keberlanjutan proses pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas usaha.

PEMULIHAN BISNIS UMKM PASCA PANDEMI

Di era *New Normal* ini, perlu disusun beberapa langkah mitigasi dan pemulihan bisnis UMKM. Untuk jangka pendek, UMKM harus menstimulus permintaan konsumen dan mendorong *platform* digital untuk memperluas kemitraan dan meningkatkan penjualannya. Pemerintah dapat membantu peningkatan mutu produk UMKM melalui riset dan penyediaan fasilitas impor bahan baku agar UMKM mampu meningkatkan daya saingnya. Untuk program pemulihan jangka panjang, perlu adanya sistem suplai barang yang memudahkan UMKM dalam mendapatkan bahan baku dan melakukan ekspansi pasar ekspor. Selain itu, perlu ada penguatan sinergi perbankan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan UMKM. Lebih jauh, diperlukan juga penyediaan data UMKM yang akurat serta dukungan digital untuk UMKM.

Dalam siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian di tahun 2022, disebutkan bahwa perkembangan UMKM menjadi *necessary condition* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perkembangan UMKM dapat menjadi *critical engine* perekonomian nasional. Dalam membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan terkait pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Dari total UMKM terpuruk selama pandemi, 84,8%-nya telah bangkit dan beroperasi kembali.

Dengan jumlah yang sangat tinggi dan perannya bagi perekonomian nasional, kemajuan UMKM menjadi salah satu syarat mutlak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu pemerintah telah menyediakan ekosistem pembiayaan UMKM yang terintegrasi agar dapat berjalan dengan optimal. Skema pembiayaan bagi UMKM diakses sesuai kelas UMKM, dan terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Beberapa di antara skema-skema tersebut telah dibebaskan dari persyaratan agunan.

Ke depannya, diharapkan banyak UMKM dapat "naik kelas" dan meningkatkan daya saing, khususnya melalui inovasi digital. Per Juni 2022, tercatat 19,5 juta UMKM telah masuk ke dalam *platform* digital. Jumlah tersebut diharapkan terus bertumbuh sehingga bisa mencapai 50 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital di tahun 2024.

Dari sisi ekspor, kontribusi UMKM mengalami peningkatan, dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Jumlah tersebut perlu untuk ditingkatkan.

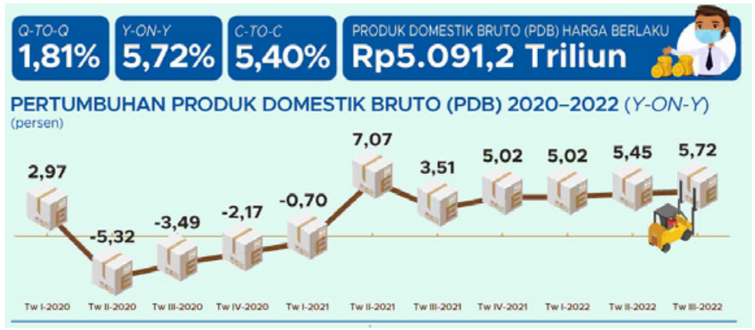

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III – 2022
Sumber: https://www.bps.go.id/; 2022

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi ekspor melalui UMKM masih relatif rendah, dimana 65 juta UMKM hanya menyumbang 15 persen dari total nilai ekspor nasional di tahun 2022. Untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam ekspor, disusun inisiatif-inisiatif yang memudahkan UMKM dalam melakukan perizinan, mendapatkan insentif fiskal, dan memperoleh akses bahan baku. Selain itu, UMKM diberikan peluang untuk masuk ke pasar global melalui *Global Value Chain* (GVC) dan *Global E-Commerce* (GEC), dalam bentuk ekspor bekerja sama dengan perusahaan asing yang terafiliasi atau agregator dalam negeri.

UMKM tentunya akan menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan berbagai pihak, mengingat peran pentingnya bagi perekonomian nasional. Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan posisinya yang tersebar di perkotaan, pedesaan, hingga pelosok terpencil, UMKM dapat menjadi sumber penyediaan barang kebutuhan yang relatif murah, titik awal investasi di daerah, sekaligus sarana peningkatan kemampuan wiraswasta masyarakat. UMKM memiliki sifat padat karya, yang memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi para pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1998, UMKM telah terbukti mampu bertahan. UMKM juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Tantangan bagi UMKM di depan masih sangat berat. Untuk mencapai UMKM maju, perlu adanya dukungan teknologi, literasi digital, kemudahan perizinan, fasilitas pembiayaan, akses bahan baku, saluran pemasaran, ketersediaan sumber daya manusia yang andal, sarana pelatihan, serta *big data* terkait UMKM. Dengan kerja sama dan dukungan dari para *stakeholders* terkait, upaya memajukan UMKM bukanlah hal yang mustahil, bahkan sangat mungkin diwujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

INDRI QORYANI

Peran *Fintech* dalam Mendukung UMKM di Indonesia

Tak ada akar, rotan pun jadi. Ungkapan itu sepertinya sangat cocok dengan kondisi Apsiah (29), perempuan peternak cupang. Ia memulai usaha peternakan cupangnya jauh sebelum dia menikah dengan suaminya. Setelah menikah, dia dan suaminya tetap menggeluti usaha peternakan cupangnya untuk dijual di Jakarta. Setiap ekor cupang akan siap untuk dipanen ketika berumur 40 hari. Apsiah mengeluarkan modal Rp2.000,- untuk setiap ekor cupang peliharaannya sampai siap dipanen dan diperdagangkan. Selanjutnya suaminya akan memasarkan cupang peliharaannya ke kota dengan menaiki angkot. Seekor cupang ia jual secara ecer dengan harga Rp2.500,-. Ia memperoleh keuntungan Rp500,- dari setiap ekor cupang yang laku dijual. Keuntungan yang tidak seberapa dan dikurangi dengan biaya akomodasi untuk naik transportasi, membuat Apsiah dan suaminya kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Pada awalnya, Apsiah menggantungkan modal usahanya dari mengikuti kegiatan arisan. Akan tetapi, menurutnya, pendapatan dari uang arisan yang tidak fleksibel membuatnya kesusahan untuk mengembangkan usahanya.

Semua itu berubah ketika Apsiah bergabung dengan Amartha. Ia menjadi mitra pembiayaan Amartha sebagai penerima dana. Ia dapat mengajukan pembiayaan untuk membeli barang modal berupa motor. Motor itu digunakan suaminya untuk mendistribusikan ikan cupangnya ke kota. Dengan memangkas bisaya akomodasi, usaha Apsiah semakin berkembang. Saat ini Apsiah dan suaminya telah memiliki ruko di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ia berharap usahanya kelak akan semakin berkembang dan memiliki toko di lokasi yang strategis, yaitu di pinggir jalan. Selain itu, dia juga berharap dapat memulai mengembangkan usaha lainnya selain peternakan ikan cupang. Apsiah dapat mengajukan pagu pembiayaan yang lebih besar ke platform Amartha karena cicilannya lancar. Baginya, keberadaan Amartha sangat membantu dalam hal memberikan pembiayaan yang fleksibel dan mengembangkan usahanya.

LIPUTAN UTAMA

Hal serupa juga dialami oleh Eno (51), seorang perempuan pedagang buah keliling di Ciseeng, Bogor. Eno menjajakan dagangannya dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung. Dia berangkat dari pukul 8 (delapan) pagi sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian ia akan melanjutkan berdagangnya dari pukul 1 (satu) siang sampai dengan pukul 5 (lima) sore. Eno berdagang buah seadanya dengan memanggul baki berisi buah di atas kepalanya sambil menawarkan dagannya ke penduduk kampung. Walaupun terasa berat, dia terpaksa melakukannya karena dia tidak mempunyai modal untuk membeli gerobak untuk menjajakan barang dagangannya. Di sisi lain, Eno mempunyai mimpi untuk membuat rumah yang layak ditinggali bagi dia dan keluarganya. Dia tidak dapat mengajukan pembiayaan ke bank ataupun koperasi simpan pinjam lainnya karena profilnya dianggap tidak layak untuk memperoleh pembiayaan secara formal dan adminitratif.

Nasib Eno berubah ketika Eno bertemu dengan Amartha. Sejak bergabung dengan Amartha, dia dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat membangun rumah yang layak bagi dia dan keluarganya. Eno merupakan salah satu dari 90% wanita di Indonesia yang tidak mempunyai akses keuangan secara formal. Baginya, Amartha sangat membantu untuk memberikan akses keuangan secara inklusif dan memberikan pembiayaan untuk modalnya dalam berjualan buah-buahan. Selain itu, dia juga dapat menigkatkan taraf hidupnya dan keluar dari garis kemiskinan.

Eno dan Apsiah adalah dua pengusaha perempuan yang dapat digolongkan sebagai pemilik UMKM. Mereka berdua adalah contoh pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi keuangan atau lebih sering dikenal dengan sebutan *Fintech*. Mereka berperan sebagai penerima dana (penerima pembiayaan) dalam skema pembiayaan *Peer to peer (P2P) lending* secara *online*. Melalui *Fintech*, mereka dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya menjadi layanan yang sangat eksklusif atau bahkan sangat tidak mungkin untuk mereka jangkau. Mereka berdua dapat memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mengubah taraf hidupnya dan keluarganya menjadi lebih baik.

Di sisi lain, Sindy (25), seorang *content specialist* dari sebuah perusahaan *start-up* akomodasi, memilih untuk berivestasi pada *platform* Amartha. Dia mengetahui Amartha pertama kali dari rekan kerjanya. Kemudian dia memutuskan untuk mempelajari apa itu Amartha, bergerak di bidang apa, visi misinya, profil bisnis dan risikonya, serta prospektus keuntungan yang akan dia dapatkan ketika berinvestasi di Amartha. Setelah mengumpulkan informasi yang lengkap mengenai Amartha dan meyakinkan dirinya sendiri dengan datang langsung ke kantornya, Sindy semakin yakin untuk berinvestasi melalui Amartha. Baginya, Amartha merupakan *platform Fintech* berjenis *P2P lending* yang aman dan jelas. Sebagai seorang *lender*, Sindy dapat memilih sendiri calon mitra penerima pembiayaan (*lendee*) sesuai dengan keinginannya. Dia dapat memantau investasinya secara *digital* melalui aplikasi Amartha pada *handphone* miliknya. Hal itu tentu saja memudahkannya dalam melakukan transaksi investasi. Prospektus yang ditawarkan oleh para mitra di Amartha terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Para mitra dapat menawarkan prospektus keuntungan 15%-20% dari keuntungan. Tapi bagi Sindy hal itu bukan merupakan hal utama untuk memutuskan berinvestasi di Amartha. Hal yang paling membuatnya yakin untuk berinvestasi melalui Amartha adalah visi yang diemban oleh *platform* tersebut. Baginya, visi Amartha sejalan dengan visi pribadinya yaitu mendukung wanita di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil, untuk dapat merdeka secara finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Amartha adalah sebuah *platform* perusahaan *Fintech* yang bergerak pada *peer to peer (p2p) lending*. Berdiri sejak tahun 2010 dan berkembang hingga saat ini. Amartha pada awalnya merupakan perusahaan keuangan mikro dengan misi dapat menjadi perantara antara pelaku usaha mikro dengan pemilik modal secara daring. Amartha menggunakan *Fintech* untuk memfasilitasi para pelaku UMKM yang kesulitan untuk memperoleh permodalan usaha karena keterbatasan jaminan yang dimiliki, pendapatan yang tidak menentu, serta tidak mempunyai sejarah kredit sebelumnya. Ia memberikan fasilitas berupa penyediaan *platform* yang dapat mempertemukan antara pengusaha UMKM dengan pemodal secara *online* sehingga masyarakat dari kalangan piramida bawah dapat memperoleh pinjaman yang berkualitas dan dapat memberikan dampak sosial yang positif. Dengan kemudahan akses layanan keuangan yang diselenggarakan oleh Amartha, masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Para pelaku UMKM yang tergolong sebagai piramida bawah dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini tentunya dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, serta membantu mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amartha bukan satu-satunya perusahaan *Fintec*h yang berbasis P2P lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan dan memberikan izin operasi bagi 114 perusahaan P2P di Indonesia. Dari 114 perusahaan tersebut, 7 (tujuh) diantaranya adalah P2P *lending* berbasis syariah, sedangkan sisanya berbasis konvensional. Adapun ketujuh P2P *lending* yang berbasis syariah tersebut diantaranya Amartha, Duha Syariah, Qazwa, Papitupi Syariah, Ammana, Alami, dan Dana Syariah. Berdasarkan Katadata (2022), penyaluran pendanaan melalui P2P lending di Indonesia per Mei 2022 mencapai 40,17 triliun rupiah. Angka yang terbilang fantastis tersebut terus tumbuh jika dibandingkan tahun 2018 yang lalu dimana hanya mecapai 18 triliun rupiah per tahunnya. Pertumbuhan pesat penggunaan *Fintech* untuk penyaluran pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kenyamanan layanan yang diberikan.

Di Indonesia, 98% usaha masyarakat masih tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Lebih dari 61%, PDB di Indonesia disumbangkan oleh industri dari kategori industri UMKM. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah serta pemanfaatan *Fintech* yang tepat sangat membantu percepatan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya industri UMKM.

Peran *Fintech* sangat kentara pada masa pandemi COVID-19. Banyak UMKM yang dapat bertahan dan bangkit di era pandemi tersebut dengan memanfaatkan teknologi *Fintech*. Dengan adanya *Fintech*, UMKM dapat terus beroperasi dan memberikan layanan secara *online* kepada para pelanggannya.

Oleh karena itu, peranan *Fintech* sangatlah besar di Indonesia. Teknologi tersebut dapat memberikan akses layanan yang inklusif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan maupun layanan keuangan tradisional lainnya. *Fintech* dapat membuka peluang untuk pemerataan distribusi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai instrumen alternatif pembiayaan selain dari Bank, mewujudkan ketahanan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, *Fintech* juga mempercepat literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Akan tetapi di sisi lain, banyak masyarakat di Indonesia yang terjerat oleh kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Lebih *epic*-nya lagi, masyarakat yang terjerat oleh pinjol ilegal 42%-nya didominasi dari masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Banyak masyarakat yang menerima teror dari pinjol tersebut. Mereka menerima perlakuan yang meresahkan bahkan beberapa pinjol ilegal melakukan kekerasan untuk menagih hutang dari konsumennya. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya literasi terkait pinjaman online. Iming-iming kemudahan di awal serta mudahnya pencairan dana, membutakan masyarakat untuk memperoleh pendaanan secara mudah dari para pinjol ilegal. Mereka tidak memahami risiko dan mempelajari kontrak dari transaksi pinjam-meminjam secara *online* tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menjadi korban adanya pinjol ilegal tersebut.

Dalam hal ini, perhatian khusus dari pemerintah sangatlah diperlukan. Pemerintah melalui badan yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia perlu melakukan literasi secara masif kepada masyarakat terkait pinjaman online, apa risikonya dan bagaimana cara mencegah serta mengatasi risiko tersebut. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pemberantasan pinjol ilegal perlu terus digalakkan untuk membasmi pinjol ilegal tersebut. Pemantauan dan pengawasan berkala juga harus ditingkatkan guna meminimalisir dan memusnahkan penyalahgunaan *Fintech* lainnya.

Peran Fintech sangat kentara pada masa pandemi COVID-19. Banyak UMKM yang dapat bertahan dan bangkit di era pandemi tersebut dengan memanfaatkan teknologi Fintech. Dengan adanya Fintech, UMKM dapat terus beroperasi dan memberikan layanan secara online kepada para pelanggannya.

NOURMA MEI SHINTA

MAJUNYA UMKM, MAJUNYA PEREMPUAN INDONESIA

"Awalnya dari tahun 2012 cuma bikin tahu dan tempe di rumah. Tapi terus harga kedelai naik, ditambah sepeda motor satu-satunya di rumah rusak. Susah kita mau usaha. Terus, enam bulan lalu, dibantu pinjaman lewat PT Permodalan Nasional Madani Cabang Batang Toru. Dari pinjaman 6 juta, dibelikan alat masak buat bikin kripik tempe, tambahan usaha baru buat mengakali harga kedelai yang mahal. Sisanya, dibelikan motor bekas buat nganter-nganter barang dagangan. Alhamdulillah bisa makin berkembang sampai sekarang"

Cerita Novita Sari dari Tapanuli Selatan adalah salah satu kisah pelaku usaha perempuan di antara 64,2 juta pelaku sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya bagi ekonomi keluarga, namun juga di dalam ekonomi Indonesia. Peranan dan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam ekonomi nasional pada tahun 2021 mencapai 61 persen. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga menyerap 97 persen dari tenaga kerja di Indonesia.

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 menunjukkan 99 persen pelaku UMKM adalah mereka yang levelnya mikro dan 57 persen di antaranya dikelola perempuan.

TANTANGAN PELAKU UMKM PEREMPUAN

Data Grup Bank Dunia menyebutkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia menjadi pelaku usaha karena tidak mendapatkan akses dari sisi kesempatan kerja secara formal. Para pelaku usaha mikro perempuan ini terjun ke dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (*necessity-driven*), bukan karena termotivasi memanfaatkan peluang pasar (*opportunity-driven*). Survei Global Entrepreneurship Monitor, di 65 negara termasuk Indonesia, juga menunjukkan bahwa kemungkinan perempuan menjadi pelaku usaha karena desakan kebutuhan adalah 20 persen lebih besar dibandingkan laki-laki.

Masalah utama pelaku usaha perempuan *necessity-driven* adalah peran sosial tradisional yang menghalangi mereka memasuki lapangan kerja formal dan mendorong mereka berwirausaha. Peran sosial tradisional inilah yang mendorong para perempuan yang memiliki peran utama sebagai istri atau ibu untuk memulai usaha kecil dari rumah, yang memungkinkan mereka menyeimbangkan kedua peran tersebut.

Para pelaku usaha perempuan pun juga dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap permodalan. Masuknya mereka ke pasar informal diakibatkan oleh sedikitnya manfaat yang mereka rasakan dari proses pendaftaran kepemilikan izin usaha yang panjang dan memakan biaya. Keterbatasan pengetahuan mengenai kredit bank dan juga rendahnya pendidikan memengaruhi akses para pelaku usaha perempuan terhadap jasa pembiayaan untuk modal memulai dan mengembangkan usaha. Kredit formal melalui bank menjadi sesuatu yang mengintimidasi bagi calon peminjam.

Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa kurang lebih 60 persen UMKM Indonesia belum mempunyai akses pembiayaan dari bank (Data Bank Indonesia). Mereka juga jarang memiliki rekening bank sendiri.

Wawancara yang dilakukan *Center for Indonesian Policy Studies* terhadap 95 pelaku usaha mikro perempuan di Wonosobo, Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa kurangnya akses modal usaha merupakan tantangan utama dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang dijalankan oleh 55 persen responden. Tantangan lain yang umum dihadapi adalah ketakutan memiliki utang kepada lembaga keuangan. Para pelaku usaha perempuan ini seringkali tidak memiliki cukup jaminan, sehingga hal ini mempersulit mereka untuk melakukan pinjaman kepada bank.

Dari sisi gender, perempuan sering dihadapkan pada berbagai macam norma yang kemudian makin membatasi mereka. Misalnya, jika seorang perempuan begitu sibuk mengurus usahanya, mereka sering kali dianggap tidak mampu menjadi istri atau ibu yang baik. Stigma atau mindset seperti ini jelas tidak membantu perempuan membangun usahanya. Cap negatif ini pada akhirnya juga membatasi upaya untuk memajukan kesejahteraan pelaku usaha perempuan maupun di dalam membangun UMKM di Indonesia.

MENYIBAK TANTANGAN MELALUI PEMBIAYAAN UMI

Begitu banyak keterbatasan dan halangan yang dihadapi oleh para perempuan di dalam mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi berbagai halangan dan keterbatasan tersebut sekaligus untuk memberdayakan perempuan pelaku UMKM, diperlukan upaya kerja sama seluruh pihak, termasuk di kalangan perempuan sendiri.

Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara dan pengelola kebijakan fiskal berkomitmen untuk menggunakan seluruh instrumen APBN, termasuk instrumen dari pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU) dan investasi untuk terus mendukung kaum perempuan yang bergerak di bidang UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah melalui program pembiayaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Pembiayaan tersebut berupa dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk bisa naik kelas dan kemudian dapat mengakses pembiayaan. Program ini adalah tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan. Melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pembiayaan UMi memberikan fasilitas plafon kredit pada awalnya paling tinggi Rp10 juta, kemudian pada tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp20 juta bagi setiap nasabahnnya.

Target awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, penyaluran pembiayaan UMi akan menjangkau sebanyak 4,9 juta pelaku usaha pada akhir tahun 2024. Hingga Juni 2022, Pembiayaan UMi telah disalurkan sebesar Rp20,79 triliun kepada 6,1 juta debitur. Capaian penyaluran tersebut telah melebihi target.

Berdasarkan survei dan kaji uji dampak aspek kesejahteraan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui seluruh kantor vertikal, Pembiayaan UMi mampu meningkatkan nilai keekonomian usaha ultra mikro. Hal ini terlihat dari kenaikan nilai keekonomian debitur UMi dari 49,85 poin di 2020 menjadi 52,64 poin di 2021.

SINERGI PEMBERDAYAAAN UMKM KEMENKEU SATU

Kementerian Keuangan meluncurkan program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu. Sinergi ini ditujukan agar berbagai kebijakan bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan akan memberikan dampak yang lebih besar. Dalam Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu, setiap unit di Kemenkeu memiliki program untuk UMKM. Direktorat Jenderal Pajak membantu dengan menerapkan PPh Final untuk UMKM. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai program untuk UMKM yang akan melakukan ekspor. Badan Kebijakan Fiskal membantu UMKM dengan menyusun kebijakan untuk mempermudah UMKM mengembangkan usahanya dan mengakses layanan keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan kebagian mengelola alokasi Pembiayaan UMi melalui PIP untuk usaha ultra mikro yang belum bankable. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan Lelang UMKM

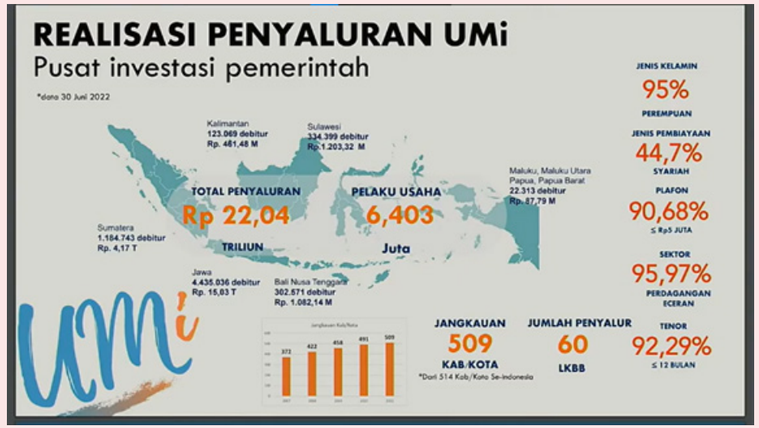

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah, 10 November 2022

Sumber: LOKeR Episode 46, 28 Oktober 2022

melalui platform yang dimilikinya. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan juga menyelenggarakan berbagai pelatihan *e-learning, microlearning,* dan *open class* dengan tema UMKM. Selain itu, unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah juga sudah menerapkan program dukungan UMKM, sehingga pendampingan dan bantuan dapat dilakukan secara lebih intens dan sesuai kebutuhan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Estty Purwadiani Hidayatie, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur yang merupakan Tim Sinergi UMKM Kementerian Keuangan dalam LOKeR 46 : "Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu" pada 28 Oktober 2022 lalu. "Dengan melakukan sinergi diharapkan Kementerian Keuangan dapat menyediakan *one-stop service* bagi UMKM, sehingga membantu menyederhanakan prosedur layanan UMKM (tidak perlu mengunjungi unit satu per satu). Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh layanan apa saja yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, diharapkan dengan sinergi ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Ke depannya akan semakin banyak sinergi yang dilakukan dalam mewujudkan Kemenkeu Satu."

HARAPAN UNTUK PELAKU USAHA PEREMPUAN DAN UMKM

Pembiayaan UMi diharapkan dapat menjadi jembatan bagi warga masyarakat yang sebelumnya menerima program bantuan sosial dan ingin belajar memulai usaha kecil-kecilan dengan proses pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan UMi diharapkan akan dapat membangkitkan kelompok masyarakat prasejahtera untuk mulai memberdayakan diri dan keluarganya melalui usaha produktif.

Program pembiayaan UMi juga dilengkapi dengan program pendampingan. Program ini dimaksudkan agar para perempuan yang merupakan 95 persen meminjam program pembiayaan UMi dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan yang semakin baik. Pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan ini juga diberikan baik bagi debitur, penyalur potensial, maupun bagi pengembangan Rumah UMi. Pendampingan dan pemberdayaan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan usaha debitur UMi, mendukung UMi naik kelas, dan mengembangkan ekosistem UMKM di wilayah. Debitur Pembiayaan UMi diharapkan belajar untuk menumbuhkembangkan usahanya dan diharapkan akan dapat naik kelas, baik usahanya maupun kesejahteraannya. Dengan begitu, kedepannya mereka dapat mengakses program pembiayaan yang lebih tinggi seperti KUR maupun kredit komersial.

Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Festival UMKM 2022 Kumparan secara daring, pada Rabu, 26 Oktober 2022, bahwa pemerintah akan terus mendorong pemberian berbagai fasilitas dan menggunakan instrumen kebijakan dan instrumen pembiayaan untuk mendorong UMKM, dan terutama para perempuan di Indonesia.

Para perempuan di Indonesia, sebagaimana disampaikan Sri Mulyani, jangan merasa terhalangi baik oleh norma maupun persepsi di masyarakat. Perempuan memiliki potensi yang sangat luar biasa dan kemampuan untuk terus menciptakan nilai tambah dan bahkan kemampuan untuk terus berupaya tanpa mengenal lelah. Keuletan identik dengan para perempuan Indonesia yang bekerja karena mereka memang mencintai pekerjaannya tanpa harus mengkhianati baik tradisi maupun kodratnya sebagai perempuan. Bekerja bagi mereka adalah untuk bisa menyumbangkan yang terbaik bagi keluarganya maupun bagi bangsa dan negara.

Sumber: Festival UMKM Kumparan, 26 Oktober 2022

"Perempuan dan sektor UMKM identik dengan perekonomian Indonesia. Majunya perempuan dan majunya UMKM tentu berarti identik dengan kemajuan ekonomi Indonesia. Ayo terus kita maju bersama dan pemerintah akan terus mendampingi dan mendorong dan memberikan berbagai upaya untuk meningkatkan peranan perempuan dan terutama melalui UMKM," kata Sri Mulyani.

MUH. ANANG AL AZIZ

Pembelajaran TerintegrasiKU, *Piloting* Pembelajaran Terintegrasi Berbasis IDP di Pusdiklat KU

Kebutuhan akan pengembangan dan transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan semakin tinggi sebagai akibat percepatan situasi global yang penuh ketidakpastian. BPPK melalui strategi Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu Corpu) melaksanakan pengembangan kompetensi SDM sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta motor penggerak untuk mewujudkan *Learning Organization* (LO). LO adalah upaya mewujudkan Kemenkeu sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu (KMK-283/PP.011/2021). Oleh karena itu, peran organisasi sebagai fasilitator dalam pengembangan dan transformasi SDM perlu diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi terwujudnya LO. Salah satu kebijakan implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pembelajaran terintegrasi.

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati, memaparkan bahwa pembelajaran terintegrasi merupakan Model Pembelajaran Baru (*The New Way of Learning)* yang fleksibel, mudah dan berdampak. "Pembelajaran terintegrasi adalah kerangka sistematis budaya belajar untuk mengakselerasi terwujudnya visi Kemenkeu sebagai *Knowledge Institution*," lanjut Heni. Pada pembelajaran terintegrasi, pelaksanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggabungkan model belajar mandiri (*self-learning*), pembelajaran terstruktur (*structured learning*), pembelajaran di lingkungan sosial (*learning from others*) dan pembelajaran praktik di tempat kerja *(learning from experiences)* yang diadakan secara klasikal maupun non-klasikal yang dikelola secara sistematis dan didukung manajemen pengetahuan. Implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui KMK-350/PP.011/2022. Tahapan implementasi pembelajaran terintegrasi terdiri dari analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pada tahapan desain dilakukan penyusunan rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, bentuk pembelajaran, lini masa, standar kompetensi, kebutuhan teknis pembelajaran, bentuk evaluasi, *output* dan *outcome* pembelajaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi. Dokumen penyusunan rencana pembelajaran dalam KMK-350/PP.011/2022 terdiri dari pembelajaran terintegrasi berdasarkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP), Rencana Aksi Pembelajaran dan *Individual Development Plan* (IDP). Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran terintegrasi berdasarkan KAP memuat rencana program pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi. Sedangkan pembelajaran terintegrasi berdasarkan RAP memuat rencana program yang dilakukan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi melalui koordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi atau Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri. Selanjutnya, pembelajaran terintegrasi berdasarkan IDP memuat rencana pembelajaran oleh pegawai melalui pembahasan dan persetujuan atasan langsung pegawai berisi kegiatan pengembangan pegawai untuk pemenuhan kebutuhan individu/jabatan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi melalui koordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi atau Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri.

Dalam rangka mendukung akselerasi implementasi pembelajaran terintegrasi Pusdiklat Keuangan Umum (KU) telah melakukan *piloting* implementasi pembelajaran terintegrasi berbasis dokumen IDP dengan tajuk "Pembelajaran TerintegrasiKU". Kegiatan ini merupakan perwujudan implementasi LO Kemenkeu yang telah berjalan sejak tahun 2021 dan pada pada tahun 2022 berfokus

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati, memaparkan bahwa pembelajaran terintegrasi merupakan Model Pembelajaran Baru (The New Way of Learning) yang fleksibel, mudah dan berdampak. "Pembelajaran terintegrasi adalah kerangka sistematis budaya belajar untuk mengakselerasi terwujudnya visi Kemenkeu sebagai Knowledge Institution."

pada pembelajaran terintegrasi. Sebagai langkah awal, *piloting* pembelajaran terintegrasi di lingkungan Pusdiklat KU dilakukan terbatas pada Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi (PMPS). Kegiatan berlangsung pada bulan April sampai dengan Juni 2022, dengan peserta dari pegawai Bidang PMPS sebanyak 16 orang. Tahapan kegiatan *piloting* Pembelajaran Terintegrasi terdiri dari periode Pekan Mentoring, periode Pekan BelajarKU dan periode Pekan Cerita Hasil BelajarKU.

Periode Pekan Mentoring dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 22 April 2022. Pekan Mentoring merupakan periode waktu bagi pegawai berdikusi *one-on-one* dengan atasan langsung untuk membahas target kinerja dan gap kompetensi, kemudian menyepakati satu kompetensi teknis yang perlu dikembangkan. Peran atasan langsung sebagai *coach* diharapkan mampu membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja bawahannya melalui arahan dan masukan pengembangan kompetensi, dalam hal ini melalui perancangan IDP yang sesuai dengan kebutuhan diri pegawai dan organisasi. Pada periode ini pegawai dan atasan langsung menyusun dan menyepakati rencana pembelajaran yang dikaitkan dengan pekerjaan atau tusi masing-masing pegawai. Selain berdiskusi dengan atasan langsung pegawai juga melakukan diskusi antar rekan kerja dalam menentukan kompetensi teknis yang ingin didalami dalam Pembelajaran TerintegrasiKU sehingga kompetensi yang akan dikembangkan merupakan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. *Output* dari periode ini adalah IDP dengan nama Rencana PembelajaranKU.

Pekan BelajarKU merupakan periode bagi pegawai untuk melakukan proses belajar sesuai dengan Rencana PembelajaranKU yang telah disepakati. Kegiatan *Coaching* dengan atasan langsung tetap dilakukan dalam periode ini dengan peran atasan langsung dalam mengarahkan model pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan pembelajaran. Misalnya, atasan langsung mendorong untuk berdiskusi dengan rekan kerja sebagai *learning buddy(s)* lain terkait praktek dan teori atau mencarikan *mentor* yang memiliki kemampuan teknis yang mumpuni pada kompetensi tersebut apabila *mentor* yang telah ditentukan sebelumnya dalam IDP berhalangan dan kurang maksimal. Peran atasan langsung lainnya adalah melakukan *monitoring* perkembangan kegiatan pembelajaran agar tepat waktu dan hasil yang diharapkan pada saat penyusunan Rencana PembelajaranKU sesuai dengan harapan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan memperkecil *gap* kompetensi. *Output* dari periode ini adalah *learning journal* yang diberi nama Catatan BelajarKU.

Setelah melaksanakan periode Pekan BelajarKU, Periode Pekan Cerita Hasil BelajarKU merupakan rangkaian tahapan selanjutnya dalam Permbelajaran TerintegrasiKU. Pekan BelajarKU berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2022. Pada periode ini pegawai menceritakan pengalaman belajar masing-masing pegawai yang telah dituangkan dalam Catatan BelajarKU. Bentuk dan format dokumen yang diunggah pegawai telah mencerminkan perjalanan proses pembelajaran dan menunjukkan berbagai kendala yang dialami selama pembelajaran. Presentasi dan cerita pengalaman belajar telah dilakukan melalui sesi daring dengan atasan langsung selama 15 menit.

Berdasarkan *piloting* implementasi pembelajaran terintegrasi yang telah dilaksanakan pada bulan April s.d. Juni 2022 terdapat hal-hal yang dapat menjadi masukan atas penyelenggaraan Pembelajaran Terintegrasi selanjutnya adalah.

Pada pelaksanaan Pekan Mentoring, formulir Rencana BelajarKU perlu disesuaikan dengan formulir IDP yang ada pada KMK-350/PP.011/2022, pengumuman terkait *piloting* Pembelajaran TerintegrasiKu terlalu dekat dengan pelaksanaan Pekan Mentoring. Selanjutnya, penjadwalan kegiatan diskusi dengan atasan langsung dalam membahas IDP perlu disesuaikan dengan pekerjaan rutin masing-masing pegawai dan atasan langsung.

Waktu periode belajarKU yang terlalu singkat bertepatan dengan libur hari raya Idul Fitri serta kesibukan pekerjaan, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan *coaching* dan *monitoring* oleh atasan langsung. Hal ini dapat di minimalisasi dengan kesepakatan penjadwalan kegiatan antara pegawai dan atasan langsung. Periode Pekan BelajarKU berlangsung pada tanggal 25 April sampai dengan 24 Juni 2022.

Pada periode Pekan cerita Hasil BelajarKU, pemaparan terhadap *output* dan *lesson learned* seharusnya tidak terbatas pada atasan langsung saja, perlu dibuat sesi berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk dapat dimanfaatkan pegawai lainnya. Pada KMK-350/PP/01/2022 telah diatur bahwa *lesson learned* yang dihasilkan dalam proses pembelajaran terintegrasi berupa aset intelektual diunggah melalui media publikasi sesuai ketentuan yang berlaku seperti KLC atau untuk Pusdiklat KU dapat menggunakan platform *rumahbelajarku.com*.

Piloting pertama Pembelajaran TerintegrasiKU akan dilanjutkan dengan mengekskalasi kegiatan bagi seluruh pegawai di Pusdiklat KU. *Piloting* lanjutan Pembelajaran TerintegrasiKU dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2022. Pelaksanaan dan standar dokumentasi serta formulir pada *Piloting* lanjutan Pembelajaran TerintegrasiKU mengacu pada KMK-350/PP.011/2022. Terdapat perbedaan tahapan dalam piloting lanjutan Pembelajaran TerintegrasiKU dimana terdapat satu tambahan tahapan yaitu tahap Evaluasi yang akan dilaksanakan pada akhir Piloting Lanjutan Pembelajaran TerintegrasiKU. Pada tahapan evaluasi yang diatur dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa untuk pembelajaran terintegrasi yang dilaksanakan berdasarkan Individual *Development Plan* (IDP), selain mendapatkan pengakuan jam pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peserta dapat juga mendapatkan surat keterangan pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu. Dokumentasi pembelajaran berupa Individual *Development Plan* (IDP), resume pembelajaran/*learning journal*, bukti pelaksanaan Individual *Development Plan* (IDP) dan *lesson learned* dalam bentuk aset intelektual sesuai ketentuan juga akan dilampirkan sebagai *output* Pembelajaran TerintegrasiKU.

Pilar Wirotama, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi Pusdiklat KU mengatakan bahwa *Piloting* lanjutan ini diharapkan menjadi *milestone* implementasi LO khususnya pembelajaran terintegrasi yang sesuai dengan yang aturan dalam KMK-350/PP.011/2022. “Dengan pelaksanaan *piloting* pembelajaran terintegrasi melalui Pembelajaran TerintegrasiKU diharapkan dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya dalam implementasi pembelajaran terintegrasi, khususnya pada pelaksanaan pemebelajaran terintegrasi berdasarkan dokumen IDP yang akan diselenggarakan pada seluruh unit kerja Kemenkeu.pada masa yang akan datang,” ucap Pilar.

Contoh IDP:

INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN

PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYUNTINGAN MEDIA PEMBELAJARAN

Nama Pegawai : Muh. Anang Al Aziz — Jabatan : PTP Ahli Pertama
Atasan Langsung : Heni Kartikawati — Jabatan : Kepala Pusdiklat KU

No.	Tujuan dan Output Pembelajaran	Kompetensi yang akan Dikembangkan	Indikator Perilaku	Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jangka Waktu Pelaksanaan	Bukti Aktivitas Pembelajaran
1	Tujuan: Mampu melakukan penyuntingan media pembelajaran dalam bentuk video menggunakan Aplikasi *Adobe Premier Pro*. Output: Penyuntingan media pembelajaran dalam bentuk video menggunakan Aplikasi *Adobe Premier Pro*.	- Memahami konsep *Editing Theory* - Mampu melakukan *Capturing Video* - Mampu melakukan proses *Editing* - Mampu menerapkan *Transition* pada proses penyuntingan - Mampu menerapkan *Color Correction* - Mampu menerapkan *Mix Audio* - Mampu melakukan *Export Import* - Mampu melakukan *Mastering Project*	- Mampu melakukan penyuntingan media pembelajaran dalam bentuk video	1. *Structured Learning:* -	-	-
				2. *Self Learning:* - Mencari dan mempelajari *bahan pembelajaran dari Youtube.*	Minggu V September s.d. Minggu IV Oktober	
				3. *Learning from others:* - Diskusi dengan rekan kerja (PTP). - Diskusi dengan WI/ Pengajar multimedia/ desain grafis.	Minggu II s.d. Minggu IV Oktober	
				4. *Coaching* dan *mentoring* - *Coaching* dan *mentoring* dengan atasan langsung.	Minggu IV Oktober 2022	
				5. *Learning while working*:	Minggu II November	

ARTIKEL:
LELIANTIKA HANDITYA DEASTRI
ANDITA TRIAS NUR AZIZAH

Berawal dari masa kecilnya yang serba kekurangan, Chairul Saleh punya mimpi besar menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi banyak orang. Di tengah kesibukannya menjadi pegawai Dirjen Pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, ia masih sempat mendirikan dan mengelola Rumah Marketer yang menjadi penggerak inovasi digital marketing bagi pelaku UMKM di kota Depok.

Chairul Saleh, pria kelahiran Batang, Jawa Tengah ini awalnya datang ke Jakarta karena tugasnya sebagai ASN di Dirjen Pajak. Chairul pun membeli rumah di Sawangan, Depok. Namun siapa sangka, di rumah inilah Chairul memulai semua mimpi-mimpinya. Chairul menjadi penggerak UMKM di kota Depok dan telah dikenal oleh masyarakat sebagai pendiri Rumah Marketer.

AWAL MULA BISNIS

Karena himpitan ekonomi, sejak kecil pria kelahiran 14 Desember 1986 ini sudah terbiasa mencari uang sendiri dengan berdagang untuk biaya sekolah. Kebiasaan ini terbawa hingga ia dewasa. Sembari bekerja sebagai PNS, Chairul merintis bisnisnya. Awal bisnisnya dimulai pada tahun 2016 dengan menjadi distributor sabuk bonceng anak. “Setiap hari sepulang kerja, saya ambil barang dagangan di pabrik, lalu pulang istirahat sebentar kemudian *packing* barang dagangan untuk dikirim ke ekspedisi esok paginya saat saya berangkat kerja.” ungkap Chairul. Usaha penjualan sabuk bonceng anak ini pun melesat hingga 30 pcs terjual setiap harinya. Ia pun merekrut karyawan dan hingga kini semua usahanya dipasrahkan kepada karyawannya. Dari penjualan sabuk bonceng anak ini, Chairul dianugerahi penghargaan Top 5 Distributor Sabuk Bonceng Anak pada tahun 2017.

Titik balik usaha Chairul berkembang pesat adalah pada tahun 2017 Chairul mengikuti pelatihan bisnis Facebook *adds*. Ilmu dari pelatihan ini ia terapkan ke bisnisnya saat itu yaitu distributor jilbab Vania. Dan hasilnya ia berhasil menjual jilbab sebanyak 13.000 pcs setiap bulannya. Pencapaian ini membuatnya mendapatkan penghargaan Top Distributor dan mendapatkan hadiah umroh gratis pada tahun 2018. Kini Chairul mempunyai banyak usaha bisnis dibawah naungan Alaballa Group yang ia dirikan.

PERJALANAN MEMBANGUN RUMAH MARKETER

Chairul telah sukses menekuni berbagai macam bisnis. Namun dari semua kesuksesan bisnisnya, ia tak serta merta menggunakannya hanya untuk keuntungan pribadinya. “Itulah mengapa saya masih memilih menjadi PNS. Karena untuk kebutuhan pribadi saya menggunakan gaji PNS, sedangkan untuk kebutuhan yayasan dan kegiatan sosial, saya menggunakan hasil dari bisnis saya” ungkap Chairul.

Setelah sukses dengan bisnisnya, pada tahun 2017 Chairul diundang untuk menjadi pembicara dan trainer oleh dinas UMKM Kota Depok. Dari situlah Chairul tergerak hatinya untuk membantu para pelaku UMKM. Pada tahun 2018, Rumah Marketer didirikan atas keprihatinan Chairul Saleh pada kondisi UMKM di Indonesia.

Menurut Chairul, banyak dari para pelaku usaha UMKM yang terhambat usahanya bukan hanya karena masalah modal, tapi juga cara pemasaran yang kurang optimal. Rumah Marketer dibuat untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. “Saya mendekati para pelaku UMKM dengan memberi perhatian kepada mereka dalam bentuk pelatihan marketing, perijinan usaha, penghitungan biaya dan tentu juga materi perpajakan.”jelas Chairul.

Selain membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, Rumah Marketer juga mempunyai misi lain yaitu untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan dengan cara meningkatkan kompetensi mereka. “Secara pribadi, saya ingin dari hasil usaha dan bisnis , punya dampak secara langsung pada masyarakat.

Menurut Chairul, banyak dari para pelaku usaha UMKM yang terhambat usahanya bukan hanya karena masalah modal, tapi juga cara pemasaran yang kurang optimal. Rumah Marketer dibuat untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. ***“Saya mendekati para pelaku UMKM dengan memberi perhatian kepada mereka dalam bentuk pelatihan marketing, perijinan usaha, penghitungan biaya dan tentu juga materi perpajakan.”*** *jelas Chairul.*

PROFIL

Masyarakat mendapat pekerjaan dan kompetensinya meningkat." Jelas Chairul. Oleh karenanya, Chairul memberikan pelatihan digital marketing secara gratis kepada masyarakat. Setiap akhir pekan, Rumah Marketer membuka pelatihan secara gratis di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sampai saat ini sudah ada 700 orang yang telah mengikuti pelatihan digital marketing di Rumah Marketer.

PEDULI PADA UMKM

Tak berhenti di program Pendidikan *digital marketing* saja, Rumah Marketer juga mempunyai banyak program diantaranya sekolahcs.com, pasar online BSI dan masih banyak lainnya. Chairul juga tak segan-segan membantu para UMKM dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga, akses ekspor dan lain sebagainya. Chairul juga mengklaim bahwa apapun permasalahan UMKM yang datang ke Rumah Marketer, pasti akan dicarikan solusinya.

Dari program rumah marketer ini, Chairul telah membantu ratusan pedagang UMKM untuk mengembangkan usahanya bahkan menjadi yang terbaik di bidangnya. " Ada dulu salah satu UKM dulunya dropship baju karate, lulusan SMA. Lalu saya bimbing untuk jualan di marketplace. Pelan-pelan karena ketekunannya ia bisa stok sendiri, menjadi top seller di marketplace, beli rumah dan akhirnya bisa menjadi salah satu penjual baju karate terbesar di Indonesia" papar Chairul.

KEGIATAN SOSIAL LAINNYA

Selain kepeduliannya pada UMKM, Chairul juga menaruh kepedulian besar pada dunia pendidikan dan keagamaan. Pada tahun 2012 Chairul telah berhasil membuat Yayasan Sahabat Quran yang merupakan lembaga pendidikan nirlaba yang kini telah mempunyai 105 guru dan 1700 santri di seluruh Indonesia. Dari yayasan ini ia memperoleh penghargaan sebagai finalis 3 besar pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat Jawa Barat.

Saat pandemi Covid-19 melanda dan banyak UMKM yang mengalami kerugian, Chairul juga tak tinggal diam. Ia membuka pasar online untuk membantu UMKM terutama di kota Depok agar tetap eksis. Inovasi pasar *online* ini dikembangkan menggunakan platform Whatsapp Group. Sampai saat ini, ia telah mengelola 10 group pasar *online* dengan berbagai program yakni, katalog belanja pasar *online*, pasar *online* peduli, dan kelas bisnis pasar *online*. Selain itu, Chairul juga membuat warung sembako gratis untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar rumahnya.

MIMPI KE DEPAN

Chairul mempunyai motto hidup "24 jam bermanfaat bagi orang lain". Setelah pencapaian luar biasa sebagai pebisnis dan pegiat sosial, penerima penghargaan top 10 pegawai inspiratif dari Kemenpan RB ini ternyata masih punya segudang mimpi lainnya. Chairul bermimpi untuk dapat menjalankan program *Training for Trainer* bagi UMKM di setiap daerah. Ia ingin nantinya lebih bisa menebar manfaat di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai batu pijakan pertama, Chairul dan tim telah menyelenggarakan event pelatihan UMKM pada akhir Desember 2022 di Riau bekerja sama dengan Yayasan Baitul Mal PLN.

IMPRESI DARI PARA RELASI

Kiprahnya di dunia UMKM yang telah menuai banyak prestasi tidak lantas membuat Chairul Saleh sedapatnya saja dalam menjalankan peran pekerjaan utamanya. Ia selalu mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh kantor secara maksimal, bahkan sering melibatkan diri dalam kegiatan lain di lingkup pekerjaan, seperti menjadi pembicara maupun menjadi anggota kegiatan keagamaan yang diadakan oleh para ASN.

Rekan kantor Chairul, Yoza-pun bercerita bahwa kesibukan Chairul dalam perniagaan memang berpengaruh pada pekerjaan, tentunya secara positif. "Pak Chairul sebagai seorang pegawai pajak menjadi lebih memahami pola pikir para pengusaha sehingga menjadi sangat lancar berkomunikasi dengan para Wajib Pajak. Hal ini memudahkan beliau dalam memperoleh informasi mengenai WP" tambah Yoza, rekan kerja yang sudah belasan tahun satu kantor dengan Chairul.

Menurutnya, aktivitas Chairul sebagai pebisnis dan pembicara yang gemar membagikan ilmu, sangat berdampak baik bagi para pengusaha UMKM, karena ilmu yang dibagikan berasal dari pengalaman sendiri, tidak bertele-tele, praktikal, dan mudah dipelajari.

Chairul selalu bersemangat dan tidak menyerah terhadap berbagai tantangan. Yoza yakin bahwa setiap usaha Chairul, baik sebagai ASN, pebisnis, dan pengajar akan membawa dampak positif bagi banyak orang.

Kamal, produsen Roti Maryam yang menjadi murid Chairul sejak ia masih di bangku kuliah, juga menyampaikan bahwa Chairul bukan hanya penggiat UMKM yang fokus sebagai trainer, tetapi juga mampu berperan sebagai pendamping. Chairul memiliki ide-ide untuk pengembangan UMKM dengan menghadirkan forum dan komunitas UMKM. Hal ini dirasa sangat berdampak untuk pengembangan UMKM. Mulai dari program Pasar Online BSI di Sawangan hingga pendampingan melalui Rumah Marketer, Kamal setuju bahwa ini adalah program yang luar biasa.

Para mitra Rumah Marketer bertutur bahwa mereka sangat terbantu karena selain menolong dalam pemecahan masalah usaha, Chairul aktif memberikan masukan untuk strategi pengembangan usaha, membantu dalam proses pemasaran, dan membagikan ilmu-ilmu yang komprehensif mulai dari identifikasi masalah hingga program pengembangan UMKM.

Mereka berharap, Chairul tetap setia membersamai UMKM dalam pembinaan, pendampingan, dan pemberian ide yang positif pada para binaan.

Serambi Ilmu

Immanuel Christian Tambunan — MENGAMBIL PELAJARAN DARI KRISIS EKONOMI SRILANKA DENGAN MEWASPADAI PERGERAKAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Yubilianto — PRESIDENSI G20 INDONESIA DALAM MENGATASI PRAKTIK BASE EROSION PROFIT SHIFTING (BEPS) UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Eri Hariyanto — KEUANGAN SYARIAH: AKSELERASI DI TENGAH PANDEMI

IMMANUEL CHRISTIAN TAMBUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

MENGAMBIL PELAJARAN DARI KRISIS EKONOMI SRILANKA DENGAN MEWASPADAI PERGERAKAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Krisis ekonomi merupakan peristiwa ketidaksehatan perekonomian yang kasat mata. Dampak negatifnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Apakah ada negara yang benar – benar imun terhadap krisis? Srilanka menjadi salah satu pelajaran dan peringatan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Seberapa mencekam krisis Srilanka? Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang langka membuat antrian yang tak kunjung habis di setiap titik stasiun pengisian. Rumah tangga kesulitan memasak makanan. Industri kesulitan berusaha. Transportasi umum beroperasi terbatas. Para pekerja harus mempertaruhkan nyawanya berjejalan menaiki gerbong kereta sampai pada pijakan kaki luar. Ibarat bola salju yang semakin besar ketika menggelinding, efek kelangkaan bahan bakar semakin masif. Harga bahan pangan dan kebutuhan sehari – hari terus melambung. Kelaparan terjadi. Pemadaman listrik di tengah suhu cuaca panas Srilanka. Pemutusan hubungan kerja terus bertambah. Tragisnya, keterbatasan persediaan obat – obatan membuat para pasien rumah sakit yang berjuang untuk sembuh juga memikul akibatnya. Semua sektor esensial lumpuh. Apa yang diperbuat oleh pemerintah Srilanka? Lubang yang sudah terlanjur dalam karena nepotisme penguasa berujung korup, membuat para elit politik menjadi sasaran demonstrasi besar – besaran. Tak sedikit rakyat Srilanka yang harus memilih mengakhiri hidupnya sendiri.

Tanpa bermaksud mengecilkan krisis Srilanka, peristiwa krisis ekonomi bukanlah hal baru yang dialami negara – negara di dunia. Secara global, kita pernah mendengar *Great Depression* (1929 – 1939) sampai dengan *Global Financial Crisis* (2007 – 2012) yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian dengan penurunan nilai aset dan instrumen investasi di hampir seluruh negara. Secara sektoral, *Dotcom Bubble* (1998 – 2000) pernah terjadi di Amerika, dimana nilai ekuitas perusahaan – perusahaan *start-up* baru berbasis teknologi bertumbuh sangat cepat akibat pendanaan modal yang mudah dan murah, kepercayaan investor pemula yang berlebihan disertai aksi spekulator, yang kemudian mengalami kebangkrutan massal. Secara regional, krisis keuangan Asia (1997 – 1998) terjadi yang dimulai di Thailand, dan menular terhadap negara – negara di Asia termasuk Indonesia, dengan kebangkrutan bisnis perbankan dan cadangan devisa yang terkuras untuk membayar pinjaman luar negeri, subsidi, dan bantuan pinjaman sektor perbankan.

Masih banyak krisis lain yang terjadi dalam sejarah dan mungkin saja saat ini masih terjadi krisis – krisis pada level mikro di negara lain. Frekuensi siklus krisis yang berulang dalam sejarah tentu membuat negara – negara harus belajar dari pengalaman di masa lalu. Jadi, apa kriteria suatu negara dikatakan mengalami krisis? Suatu negara dikatakan mengalami krisis adalah ketika terjadi penurunan berbagai indikator perekonomian yang sangat signifikan. Beberapa indikator dimaksud antara lain merosotnya Produk Domestik Bruto (PDB) secara drastis, tingginya tingkat inflasi, signifikannya penurunan belanja pemerintah, kegagalan pembayaran utang pemerintah, tingginya tingkat pengangguran (melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja), kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, dan indikator lainnya. Kalau resesi terjadi penurunan dalam waktu 2 kuartal secara berturut – turut, maka krisis akan lebih lama dan lebih buruk lagi dari situasi resesi tersebut. Negara harus hadir melalui pengelolaan risiko krisis tersebut. Salah satu usaha preventifnya adalah dengan mewaspadai sinyal krisis tersebut melalui indikator ekonomi makro dan keuangan yang akan diuraikan di bawah.

TINGKAT INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN *(CONSUMER PRICE INDEX)*

Menurut Bank Sentral Sri Lanka, tingkat inflasi telah mencapai 54.6% per tahun atau sebesar 12,8% per Juli 2022 (*Trading Economics* 2022)[1]. Apa itu inflasi? Definisi inflasi menurut Bank Indonesia (2022)[2] adalah kenaikan harga atas mayoritas barang dan jasa suatu negara dan terjadi berkelanjutan dalam periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur berdasarkan selisih Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI) dari suatu kelompok atau kategori barang dan jasa *(basket of goods and services)* antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pemilihan jenis kelompok barang dan jasa ini dilakukan berdasarkan survei konsumen sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat atas

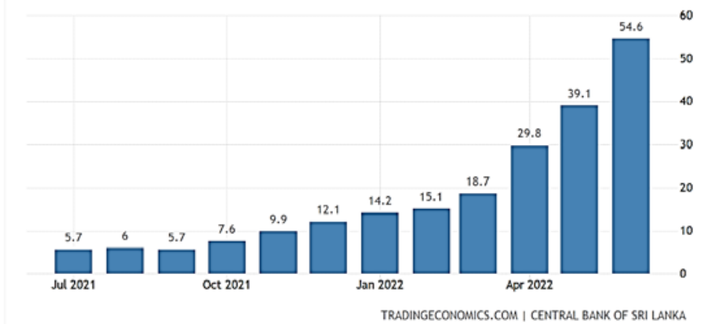

setiap kelompok barang/jasa. Indonesia sendiri menggunakan tujuh kelompok pengeluaran utama berdasarkan *Classification of Individual Consumption by Purpose*, yaitu: 1. Kelompok Bahan Makanan, 2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau, 3. Kelompok Perumahan, 4. Kelompok Sandang, 5. Kelompok Kesehatan, 6. Kelompok Pendidikan dan Olahraga, dan 7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Untuk lebih memperjelas darimana tingkat inflasi Srilanka Juli 2022 sebesar 12,8% berasal, kita akan menghitungnya dengan memanfaatkan data IHK dua bulan terakhir.

Formula: (IHK Juli 2022 – IHK Juni 2022) / IHK Juni 2022 x 100%, sehingga diperoleh: (220.20 – 195.20) / 195.20 x 100% = 12.8%. Pada krisis ekonomi Sri Lanka, penyebab inflasi utamanya disebabkan oleh faktor penawaran atau biaya produksi, yang juga disebut *cost push inflation*. Srilanka dan hampir sebagian besar negara di dunia sangat tergantung pada impor bahan bakar dimana kenaikan harga pasar minyak dan gas internasional yang disebabkan oleh perang Rusia – Ukraina, mengakibatkan kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar di pasar domestik dan barang kebutuhan pokok seperti harga bahan pangan yang meroket sampai 80%. Parahnya lagi, masyarakat Sri Lanka mulai banyak beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak dan terjadinya penutupan banyak krematorium karena kelangkaan bahan bakar gas (BBC *News* Indonesia 2022)[3].

Indeks Harga Konsumen Cpi	220.20	195.20	Poin	Jun 2022
Inflasi Inti	197.90	182.30	Poin	May 2022
Tingkat Inflasi Inti	22.00	13.00	Persen	Apr 2022
PDB Deflator	170.11	151.90	Poin	Dec 2021
Harga Ekspor	280.79	235.21	Poin	May 2022
Harga Impor	393.67	303.08	Poin	May 2022
Tingkat Inflasi (Bulanan)	12.80	8.30	Persen	Jun 2022

NILAI TUKAR MATA UANG DOMESTIK TERHADAP US DOLLAR *(FOREIGN EXCHANGE RATE)*

Hampir semua mata uang menggunakan pembanding nilai tukar terhadap USD karena USD menjadi salah satu mata uang yang cukup stabil dan mayoritas negara menyimpannya sebagai salah satu cadangan devisa (*major/hard currency*). Bagaimana dampak krisis ekonomi Sri Lanka terhadap nilai tukar (kurs) mata uang domestiknya, yaitu Rupee Sri Lanka terhadap USD (LKR/USD)? Terjadi penurunan yang sangat drastis khususnya pada Maret – Mei 2022. Pada 22 Juli 2022, nilai tukar LKR/USD menyentuh 0,002775 (1 Rupee Sri Lanka = 0,2775 sen US Dollar) (*Trading Economics* 2022)[4]. Berbeda halnya dengan tingkat inflasi yang bisa dihitung langsung dengan menggunakan data IHK, nilai tukar mata uang diperoleh dari harga yang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar

[1] *Trading Economics 2022, Tingkat Inflasi Sri Lanka, viewed 22 July 2022, https://id.tradingeconomics.com/sri-lanka/inflation-cpi* [2]*https://tirto.id/eVjw diakses tgl 24 April 2020*
[2] *Bank Indonesia 2022, Inflasi, viewed 22 July 2022, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/*
[3] *BBC News Indonesia 2022, Krisis Sri Lanka: Tujuh faktor yang memicu tsunami politik, mulai dari biaya hidup hingga jebakan utang, viewed 22 July 2022, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62174128*
[4] *Trading Economics 2022, Kurs LKR USD Srilanka Rupee US Dollar, viewed 22 July 2022, https://tradingeconomics.com/lkrusd:cur*

mata uang asing *(foreign exchange market)*. Walaupun begitu, kita dapat mengetahui faktor - faktor yang memengaruhi nilai tukar dan bagaimana skenario pelemahan nilai tukar mata uang Rupee Srilanka.

Mekanisme permintaan dan penawaran mata uang ini memiliki kemiripan dengan permintaan dan penawaran pada barang dan jasa. Fungsi nilai tukar secara umum menggunakan model: $e = f$ (ΔINF, ΔINT, ΔINC, ΔGC, ΔEXP), dimana e: nilai tukar, INF: *inflation* (inflasi), INT: *interest* (imbal hasil), INC: *income* (pendapatan), GC: *Government Control* (Pengendalian Pemerintah), dan EXP: *Expected Exchange Rate* (ekspektasi nilai tukar di masa depan). Inflasi yang tinggi (ΔINF) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar (e). Berikut ini adalah skenario alur berpikir yang dapat membantu pemahaman proses pelemahan nilai tukar akibat inflasi tinggi:

1. Terjadi peningkatan harga barang – barang (inflasi) di Sri Lanka yang terutama disebabkan kenaikan harga impor minyak dan gas. Hal ini dibuktikan dengan fakta kenaikan dua kali lipat pada biaya transportasi Sri Lanka (BBC *News* Indonesia 2022).

2. Karena harga barang domestik yang melonjak, harga barang dari luar negeri secara relatif menjadi lebih murah dibandingkan barang dalam negeri.

3. Permintaan Sri Lanka atas barang dari luar negeri menjadi meningkat (impor meningkat), sementara permintaan negara lain terhadap barang produksi Sri Lanka menjadi menurun (ekspor menurun). Hal ini sesuai dengan fakta ketidakseimbangan neraca perdagangan Sri Lanka dengan selisih kelebihan nilai impor di atas ekspor sebesar USD 3 miliar per Juli 2022 (BBC *News* Indonesia 2022).

4. Dampak dari impor yang meningkat menyebabkan permintaan Sri Lanka terhadap mata uang asing menjadi meningkat (mayoritas impor menggunakan mata uang negara eksportir). Di sisi lain, dampak dari ekspor yang menurun menyebabkan penawaran (produksi) Sri Lanka terhadap mata uang asing menjadi menurun.

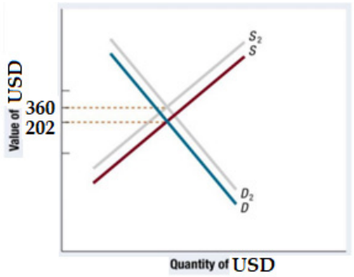

5. Berdasarkan poin 4 di atas, dihasilkan kurva berikut dengan mencontohkan negara eksportir adalah Amerika (mata uang USD). Permintaan terhadap USD meningkat (D ke D_2) dan penawaran terhadap USD menurun (S ke S_2) mengakibatkan nilai tukar USD menjadi menguat (202 menjadi 360), sebaliknya nilai tukar LKR menjadi jatuh. Karena nilai tukar yang sangat lemah, Sri Lanka kesulitan memenuhi kebutuhan barang – barang impor. Persediaan mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membayar kebutuhan impor dimaksud. Hal ini sejalan dengan fakta kondisi cadangan devisa yang awalnya senilai USD 7,6 miliar, menurun secara signifikan sebesar 2991%, menjadi USD 250 juta pada Juli 2022 (BBC *News* Indonesia 2022).

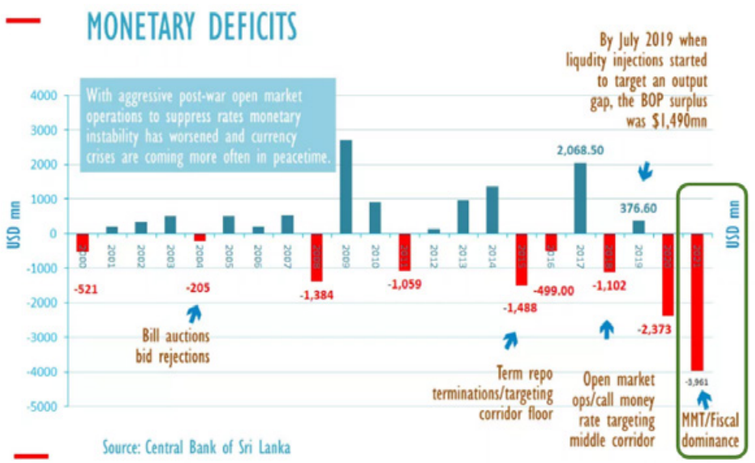

NERACA PEMBAYARAN *(BALANCE OF PAYMENTS)*

Bank Sentral Srilanka mencatat nilai defisit tertinggi dalam sejarah pada Neraca Pembayaran (Neraca Berjalan dan Neraca Modal) sebesar USD 3.961 juta per Juli 2022 (*BBC News* Indonesia 2022) dan ditampilkan dalam grafik di bawah ini (Economynext 2022)[5]. Neraca Pembayaran *(Balance of Payment)*, adalah laporan arus kas atas seluruh transaksi ekonomi antara warga suatu negara dengan warga negara asing selama periode tertentu. Ada 3 komponen besar dalam neraca pembayaran yaitu:

1. Neraca Berjalan *(Current Account/ CA)* yang mencatat arus transaksi pembayaran dan pendapatan, terdiri dari: ekspor dan impor barang dan jasa, pembayaran bunga (imbal hasil) dan dividen, pendapatan perusahaan dan pekerja dari luar negeri, pengiriman uang internasional (remitansi) atas penghasilan, hibah luar negeri, hadiah, dan bentuk pemberian internasional lainnya.

2. Neraca Modal *(Capital Account/ KA)* yang mencatat arus transaksi penjualan dan pembelian aset, terdiri dari: Investasi Langsung Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) berupa fasilitas produksi, bangunan, mesin; Investasi Portofolio berupa saham, obligasi, dan derivatif; Investasi aset lainnya berupa rekening deposit internasional, kredit usaha, pinjaman, piutang usaha; dan Investasi aset non finansial tidak berwujud berupa hak paten, hak cipta, lisensi.

3. Neraca Moneter *(Official Reserves Account/OR)* yang merupakan cadangan mata uang asing (devisa) dimiliki dan digunakan untuk tujuan perdagangan internasional dan transaksi keuangan. Mata uang asing yang digunakan secara umum menggunakan *major/hard currencies* yaitu: USD, GBP, Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), dan Chinese Yuan (CNY).

Persamaan umum neraca pembayaran yaitu: CA + KA + OR = 0. Setiap transaksi di akun CA biasanya akan mempengaruhi akun KA. Contoh: transaksi ekspor teh oleh perusahaan Sri Lanka ke perusahaan Amerika dengan pembayaran transfer deposit dalam Rupee Srilanka (LKR) dari rekening bank perusahaan Amerika di Sri Lanka. Akun yang terpengaruh di CA adalah barang ekspor ke Amerika *(Goods trade)*, dan di KA adalah penurunan deposit internasional USD yang ditukar menjadi LKR *(Other Asset Investment)*. Akan tetapi terdapat transaksi yang hanya berpengaruh dalam akun KA saja. Misalnya, transaksi pembelian obligasi pemerintah US oleh perusahaan Sri Lanka, dimana pembayaran dilakukan dengan USD di rekening bank perusahaan Sri Lanka di Amerika. Akun yang terpengaruh di akun KA yang pertama adalah penurunan deposit internasional USD di Sri Lanka *(Other Asset Investment)*, dan di akun KA yang kedua adalah peningkatan investasi Sri Lanka atas portofolio obligasi pemerintah US *(Portfolio Investment)*. Melalui cadangan devisa dalam akun OR, selisih CA dan KA dapat ditutupi. Meskipun begitu, keseimbangan persamaan ini jarang terjadi karena beberapa tantangan seperti kesulitan menelusuri seluruh transaksi ekonomi apalagi transaksi ilegal yang tidak tercatat, kesalahan pengukuran, dan perbedaan waktu pencatatan antara dua sisi transaksi ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan akun tambahan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran yaitu akun selisih perhitungan, yang disebut juga *Net Errors and Omissions Account* atau *Net Statistical Discrepancies*.

Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari defisit Neraca Pembayaran (Neraca Berjalan dan Neraca Modal) Sri Lanka (CA + KA < 0)? Defisit ini berarti Sri Lanka telah kehilangan banyak devisa karena: 1. Pada komponen Neraca Berjalan (CA) lebih banyak terjadi impor daripada ekspor barang dan jasa dan/ atau lebih banyak pembayaran ke luar negeri daripada penerimaan dari luar negeri (imbal hasil, dividen, pendapatan perusahaan dan pekerja); dan 2. Pada komponen Neraca Modal (KA) lebih banyak arus penjualan daripada pembelian aset (investasi) Sri Lanka di luar negeri dan/atau lebih banyak pinjaman Sri Lanka ke luar negeri dibandingkan pemberian pinjaman. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Srilanka memiliki pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur sebesar USD 51 miliar per Juli 2022 yang dipicu akibat kondisi pasca perang saudara pada 2009 (BBC *News* Indonesia 2022). Karena defisit, maka neraca moneter (OR) harus surplus, artinya pemerintah melalui bank sentral harus membeli devisa dengan cara menjual atau menukar Rupee Sri Lanka. Lalu, apakah Sri Lanka dapat mencetak uang *(printing money)* sebanyak – banyaknya? Tidak, karena hal ini dapat memicu hiperinflasi, seperti yang terjadi di negara Zimbabwe dan Venezuela yang membuat nilai uang tidak berarti karena harga barang yang sangat tinggi.

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN SRI LANKA

Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham berdasarkan proporsi (bobot) nilai pasar setiap perusahaan. Seperti terlihat pada grafik (Investing.com 2022)[6], Indeks Harga Saham Gabungan Sri Lanka merosot signifikan

[5] *Economynext 2022, Sri Lanka BOP deficit hits record US$3.9bn in 2021 amid money printing, viewed 22 July 2022, https://economynext.com/sri-lanka-bop-deficit-hits-record-us3-9bn-in-2021-amid-money-printing-90455/*

[6] *Investing.com 2022, CSE All-Share (CSE), viewed 22 July 2022, https://id.investing.com/indices/cse-all-share*

pada Februari - April 2022 (bersamaan dengan periode penurunan nilai tukar). Karena krisis ekonomi yang terjadi, para investor di Srilanka memprediksi tingkat pengembalian (imbal hasil) investasi yang rendah saat ini akan terjadi dalam periode tertentu di masa depan, sehingga investasi di Sri Lanka dianggap kurang menarik dan investor segera memindahkan dananya ke negara lain yang memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi. Efeknya adalah permintaan terhadap LKR akan menurun. Investasi di Srilanka akan dijual dan dikonversi menjadi mata uang asing, sehingga penawaran LKR akan meningkat. Efek imbal hasil investasi Srilanka yang lebih rendah dari negara lain ini mengakibatkan nilai tukar mata uang domestik melemah.

Berdasarkan indikator – indikator ekonomi makro dan keuangan di atas, kita dapat memahami bahwa krisis ekonomi di Sri Lanka dan krisis ekonomi lainnya secara umum berdampak pada tingkat inflasi yang tinggi, nilai tukar mata uang domestik yang melemah, neraca pembayaran yang defisit, Indeks Harga Saham Gabungan yang merosot, dan indikator – indikator lainnya. Melalui pengenalan indikator – indikator ekonomi dan keuangan yang baik, dapat membantu kita memahami pengambilan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dan Bank Sentral, misalnya dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dengan bantuan sosial dan subsidi, serta peningkatan suku bunga untuk mengembalikan kepercayaan investor. Bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah yang tepat saasaran akan mendorong peningkatan belanja pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari – hari, termasuk pembelian BBM dan bahan pangan. Perputaran uang akan berlanjut sedemikian rupa kepada pedagang dan industri. Industri akan bertumbuh positif, yang ujungnya kembali lagi ke pertumbuhan jumlah lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan pekerja. Tingkat inflasi akan lebih dapat dikendalikan. Bersamaan dengan itu, peningkatan suku bunga akan menumbuhan kepercayaan investor (dalam dan luar negeri) untuk menanamkan modalnya lebih banyak ke dalam negeri, karena tingkat suku bunga domestik yang lebih bersaing secara global. Semakin banyaknya modal korporasi yang masuk, akan meningkatkan indeks harga saham gabungan yang berdampak pada nilai pasar perusahaan dalam negeri yang terus meningkat. Selain itu, produksi dan ekspor akan meningkat dan disertai penambahan permintaan tenaga kerja domestik. Defisit neraca pembayaran akan semakin kecil, dan bahkan dapat surplus, karena tingkat ekspor bersama dengan investasi ke dalam negeri lebih tinggi dari tingkat impor ditambah dengan investasi ke luar negeri.

Akan tetapi, yang perlu diingat adalah kebijakan ekonomi ini tidak lepas dari tata kelola pemerintahan yang benar. Berkaca dari krisis ekonomi Srilanka, faktor politik dan kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Layaknya pohon yang kokoh harus memiliki akar yang kuat, maka negara yang resilien harus memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan iklim politik yang stabil. Seberapa keraspun angin badai yang menerpa, pohon tersebut dapat bertahan. Oleh karena itu, seberapa hebatpun faktor eksternal seperti krisis global yang mengancam (perang Rusia-Ukraina, dan lain sebagainya), negara tetap dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakatnya.

YUBILIANTO
WIDYAISWARA AHLI MUDA PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

PRESIDENSI G20 INDONESIA DALAM MENGATASI PRAKTIK BASE EROSION PROFIT SHIFTING (BEPS) UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

PERAN INDONESIA DALAM PRESIDENSI G20

Tahun 2022 ini, Indonesia memperoleh kehormatan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT G20. G20 merupakan suatu forum yang terdiri dari 20 anggota yaitu 19 negara dan 1 Uni Eropa. Sebagai forum ternama yang besar dan merepresentasikan 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, 75% perdagangan internasional, 80% investasi serta 2/3 populasi dunia, peran G20 terhadap politik dan perekonomian global sangat signifikan.

Secara garis besar, G20 ini terpisah menjadi dua kubu, yaitu kubu negara-negara maju (*Developed Countries*) dan kubu negara-negara berkembang (*Developing Countries*). Dalam presidensi G20 ini, Indonesia mengambil posisi ditengah-tengah untuk dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak tersebut.

Dengan menjadi presidensi G20, Indonesia diberi keleluasaan dalam memimpin dan mengarahkan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global. Keseluruhan agenda dimaksud berfokus pada proses pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui perbaikan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan global.

Melalui tema "*Recover Stronger, Recover Together*", Indonesia berupaya memandu proses pemulihan ekonomi global melalui *exit strategy* yang terkoordinasi, terkalibrasi dan terkomunikasikan dengan baik. Selanjutnya, Indonesia juga mendorong agar negara-negara anggota G20 dapat menyepakati kebijakan yang mendukung pengentasan permasalahan terkait dengan pemulihan ekonomi dari negara-negara yang terdampak pandemi Covid-19[1].

PERAN PAJAK UNTUK PENDANAAN PEMBANGUNAN

Dalam forum G20 ini, terdapat beberapa *exit strategy* dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi isu prioritas yaitu terkait dengan *taxation* (perpajakan) sebagai sumber keuangan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi tersebut. Melalui forum dimaksud, Indonesia mendorong agar G20 dan negara-negara anggotanya dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berkesinambungan melalui aturan perpajakan internasional yang berkeadilan.

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, negara membutuhkan sumber dana yang cukup. Saat ini, hampir seluruh negara mengandalkan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan, disamping penerimaan dari sumber lainnya. Dengan demikian, pajak menjadi menjadi hal yang krusial dan menjadi fokus bagi seluruh negara di dunia dalam rangka pembangunan dan pemulihan pasca pandemi.

Pajak merupakan sebuah mekanisme bagi pemerintah untuk memungut penerimaan dari masyarakat dan menggunakannya dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Disamping itu, pajak juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakannya dibidang fiskal yang dapat memengaruhi pola konsumsi dan investasi di masyarakat.

Dengan demikian, peran pajak bagi suatu negara merupakan suatu hal penting dan tidak terelakkan lagi. Sebagai sumber penghasilan utama pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan, pajak memegang peranan utama yang harus dioptimalkan baik dari segi penerimaannya maupun penggunaannya.

Dari segi penerimaan, pemerintah perlu terus mengupayakan agar dapat memastikan penerimaan pajak yang diterima telah sesuai dengan yang seharusnya; tidak ada wajib pajak yang kurang membayar atau bahkan tidak membayar. Disamping itu, pemerintah juga perlu secara cermat mencegah potensi kehilangan penerimaan perpajakan dari suatu kebijakan yang tidak tepat.

[6] *Berita KBR. (2022, February 25). Talkshow Ruang Publik KBR: Presidensi G20 dalam Membangun Perpajakan dan Keuangan Berkelanjutan [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HGmiuz02SMQ*

Dari sisi pengeluarannya, dana yang diperoleh dari pajak tersebut seyogianya dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu mengupayakan kebijakan pengeluaran yang tepat sasaran. Disamping itu, perlu diawasi penggunaannya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

PEREKONOMIAN TERBUKA: POTENSI DAN TANTANGAN PERPAJAKAN

Tidak diragukan lagi bahwa globalisasi dan modernisasi menyebabkan bisnis berkembang pesat dan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan. Di satu sisi, bisnis menjadi lebih global dan perusahaan menjadi lebih leluasa untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam berinvestasi di negara-negara lain yang memiliki keunggulan kompetitif. Disisi lain, banyak negara juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong laju investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional melalui pemberian insentif, khususnya dari segi perpajakan. Mereka ingin agar perusahaan-perusahaan multinasional dimaksud mau menanamkan modalnya di negaranya guna mengakselerasi proses pembangunan.

Pada kondisi ini, para perusahaan multinasional dimaksud pada umumnya berupaya untuk memaksimalisasi profit dan meminimalisasi biaya dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan lokasi usaha dari negara yang "berbiaya tinggi" ke negara yang "berbiaya rendah". Salah satu komponen biaya yang dipertimbangkan bagi perusahaan multinasional tersebut adalah "biaya pajak", disamping biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja dan material. Dengan perubahan struktur yang terjadi akibat perekonomian yang lebih terbuka serta modernisasi dan digitalisasi tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif tapi juga menimbulkan dampak yang negatif, khususnya terkait dengan penghindaran pajak (*tax evasion* dan *tax avoidance*).

Pada Presidensi Indonesia G20, perpajakan internasional menjadi salah satu agenda utama. Sampai dengan sekarang, masih belum terdapat standar peraturan perpajakan internasional yang menjadi acuan dari penerapan perpajakan di seluruh dunia. Hal tersebut berdampak terhadap kerugian akibat adanya strategi penghindaran perpajakan oleh perusahaan multinasional disebabkan oleh perbedaan tarif pajak domestik di tiap-tiap negara atau dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

BEPS merupakan upaya dari perusahaan multinasional untuk memanipulasi secara legal dengan cara memindahkan keuntungannya dari yurisdiksi berpajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak yang rendah. Dengan demikian, perusahaan tersebut hanya perlu membayar pajaknya di yurisdiksi berpajak terendah yang mereka daftarkan walaupun mereka memeperoleh profit dari wilayah lain yang berpajak tinggi[2]. Selain itu, kerahasiaan data perbankan dan kurangnya transparansi membuat banyak individu maupun perusahaan menyembunyikan harta kekayaan maupun hasil usaha dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan internasional ini.

Bagi negara-negara berkembang, isu terkait reformasi perpajakan internasional merupakan hal yang penting dan perlu diangkat dalam presidensi G20. Optimalisasi penerimaannya dapat membantu proses pemulihan perekonomian bagi negara-negara tersebut. Banyak negara-negara berkembang sangat bergantung pada pajak penghasilan badan dan penanaman modal asing sehingga sangat terpengaruh dengan isu BEPS ini secara tidak proporsional.

REFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL UNTUK OPTIMALISASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sekitar 140 negara dan yurisdiksi bergabung untuk mewujudkan G20/ *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Inclusive Framework* terkait BEPS. Negara-negara tersebut sepakat untuk mereformasi peraturan perpajakan internasional dan memastikan perusahaan multinasional membayar persentase pajak yang wajar dimanapun mereka beroperasi. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Disamping itu, reformasi peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan koherensi, memastikan transparansi, dan mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi.

Setidaknya, sekitar USD100 miliar sampai dengan USD240 miliar setiap tahunnya jumlah potensi penerimaan dari perpajakan yang hilang akibat dari praktik BEPS ini. Setara dengan 4% sampai dengan 10% dari pendapatan pajak penghasilan perusahaan secara global, jumlah tersebut sangat signifikan bagi negara-negara untuk pemulihan ekonomi paska pandemi.

Disamping itu, pandemi Covid-19 telah menyebabkan lesunya perekonomian yang berakibat pada berkurangnya penerimaan dari sektor pajak secara signifikan. Dengan berkurangnya sumber pendanaan tersebut, maka pemerintah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal.

Peraturan perpajakan internasional yang berkeadilan diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkesinambungan untuk pembangunan ekonomi di seluruh negara. Untuk itu, Indonesia mendorong agar G20 dapat lebih berperan aktif guna mendukung implementasi perpajakan internasional yang bekeadilan oleh negara-negara berkembang dan memobilisasi sumber daya domestik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Negara-negara berkembang diharapkan dapat mengidentifikasi upaya peningkatan sumber daya domestik dengan beban pajak yang lebih adil untuk perusahaan multinasional sekaligus mengatasi penghindaran pajak dan reformasi insentif pajak yang tidak sesuai dengan semangat pajak yang berkeadilan. Hal tersebut perlu dilakukan demi mewujudkan keadilan pajak intenasional yang lebih proporsional dan non-diskriminatif, sehingga tidak ada negara yang dirugikan

G20 Indonesia pada acara puncaknya, yaitu saat pertemuan para pemimpin negara di Bali, menyepakati beberapa poin penting yang tercantum dalam *G20 Bali Leaders' Declaration*[3]. Salah satu kesepakatan dalam deklarasi tersebut terkait implementasi paket perpajakan internasional dua pilar[4] sebagai solusi konkrit yang diajukan oleh OECD/ G20, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Peran Indonesia melalui presidensi G20 dalam memastikan agenda reformasi perpajakan internasional menjadi sangat krusial. Melalui penerapan dua pilar tersebut sebagai bentuk upaya reformasi perpajakan internasional, diharapkan praktik BEPS dapat dihilangkan. Disamping itu, tambahan penerimaan dari pajak melalui pencegahan BEPS dan pengalokasiannya yang berkeadilan dapat dinikmati oleh negara-negara terkait sebagai sumber pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 untuk pembangunan berkelanjutan.

Pilar 1
Upaya reformasi peraturan perpajakan untuk menciptakan hak perpajakan yang berkeadilan bagi negara-negara pasar produk dan jasa digital. Hal ini dilakukan melalui *nexus* penghasilan perusahaan multinasional agar negara-negara dimaksud dapat memperoleh alokasi dari porsi pajak perusahaan multinasional sebagai pendapatan yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan.
1. Cakupan dari reformasi perpajakan untuk pilar 1 ini yaitu perusahaan multinasional dengan omset global diatas €20 miliar dan laba sebelum pajak sebesar 10%. 2. Untuk perusahaan multrinasional dengan penghasilan sekurang-kurangnya €1 juta dari suatu yurisdiksi tertentu, dapat mengalokasikan jumlah untuk penghitungan pajaknya dan menyetorkannya ke yurisdiksi dimaksud. Untuk wilayah dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kurang dari €40 miliar, *nexus* ditetapkan sebesar €250 ribu. 3. Untuk perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan tersebut, 25% dari sisa laba akan dialokasikan ke yurisdiksi pasar dengan *nexus* menggunakan kunci alokasi berbasis pendapatan (*revenue-based allocation key*) 4. Pajak berganda atas laba yang dialokasikan ke yurisdiksi pasar akan dibebaskan dengan menggunakan *exemption* atau metode kredit.

Pilar 2
Menyepakati tarif pajak minimal untuk perusahaan multinasional secara global atau *Global anti-Base Erosion* (GLoBE). Dengan tarif pajak yang sama berlaku secara global, diharapkan dapat mengurangi "perang tarif" antar negara yang dapat menyebabkan praktik BEPS.
1. Cakupan dari reformasi perpajakan untuk pilar 2 ini yaitu perusahaan multinasional dengan peredaran bruto tahunan sejumlah €750 juta`atau lebih. 2. Pengenaan tarif pajak secara global sebesar 15%, baik di kantor pusat maupun di kantor operasional.

[2] *OECD (2021), Developing Countries and the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. OECD. https://www.oecd.org/tax/beps/developing-countries-and-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps.htm*

[3] *G20 Indonesia (2022), G20 Bali Leaders' Declaration. G20. https://www.g20.org/en/about-g20/#previous-summits*

[4] *OECD (2021), Statement on a Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy: OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm*

ERI HARIYANTO
WIDYAISWARA MADYA PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

KEUANGAN SYARIAH: AKSELERASI DI TENGAH PANDEMI

Penulis teringat peristiwa di tahun 2010. Ketika itu penulis sedang mengikuti rapat pembentukan arsitektur pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dalam rapat itu, diantaranya ditetapkan *tentative* target perbandingan pertumbuhan aset keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional (*market share*). Peserta rapat sebagian besar merupakan para pembuat kebijakan di sektor finansial dari berbagai institusi. Mereka sangat optimis bahwa keuangan syariah di Indonesia akan tumbuh secara baik. Harapannya di tahun 2020 *market share* aset keuangan syariah sudah mencapai 20% jika dibandingkan dengan keuangan konvensional.

Kemudian, dimulailah dinamika pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, di sisi Pemerintah. Berbagai industri keuangan dan lembaga independen juga ikut menjadi penggerak. Berikutnya berdirilah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun 2016, selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2020. KNEKS langsung dinahkodai oleh Presiden dan Wakil Presiden, dengan harapan akan memiliki kekuatan pengungkit luar biasa bagi pengembangan keuangan syariah.

Sekarang, mampukah target itu terpenuhi?

Melihat fakta di lapangan (Gambar 1) keuangan syariah mampu terus tumbuh, meski menghadapi berbagai macam tantangan. Krisis Moneter 1997-1998, krisis keuangan global 2008, krisis

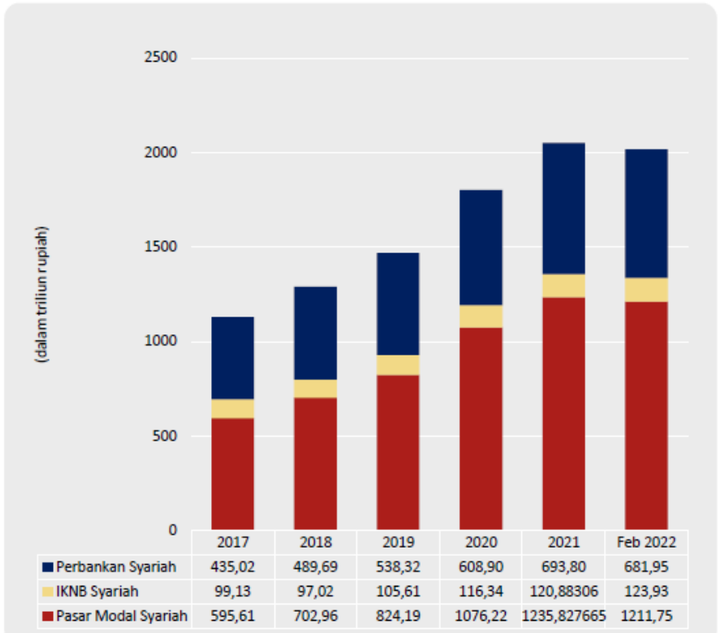

	2017	2018	2019	2020	2021	Feb 2022
Perbankan Syariah	435,02	489,69	538,32	608,90	693,80	681,95
IKNB Syariah	99,13	97,02	105,61	116,34	120,88306	123,93
Pasar Modal Syariah	595,61	702,96	824,19	1076,22	1235,827665	1211,75

Sumber: OJK, 2022
Gambar 1 Pertumbuhan Keuangan Syariah 2017- Feb 2022

Eropa 2010, hingga pandemi Covid-19 2020-2021 telah menjadi ujian bagi perkembangan keuangan syariah, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan yang terus terjadi menjadi sebuah indikator bahwa keuangan syariah memiliki resiliensi yang tinggi dalam menghadapi guncangan perekonomian.

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia saat ini, memang belum sesuai target yang ditetapkan. Namun, prestasi yang telah dicapai patut disyukuri dan berusaha sekuat tenaga untuk diakselerasi di masa depan.

Di tengah pandemi yang masih melanda dan berdampak pada resesi ekonomi, keuangan syariah mampu menunjukkan performa pertumbuhannya yang mengesankan. Bahkan, di masa pandemi ini keuangan syariah mampu menjauh dari jebakan *market share* 5% yang pernah bertahan cukup lama. Di tahun 2021, *market share* keuangan syariah berakselerasi mendekati angka 10%.

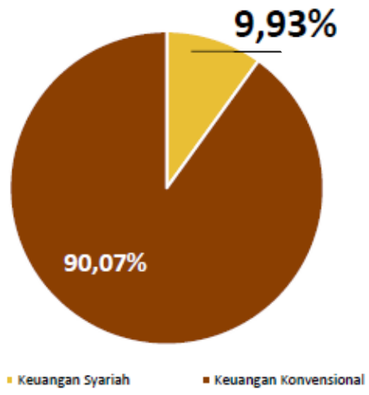

Sumber: OJK, 2022
Gambar 2 Total Asel Keuangan Syariah (tidak termasuk saham syariah) dibandingkan Keuangan Konvensional.

OJK menyebutkan bahwa pada Februari 2022, total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah telah mencapai RP2.017,63 triliun atau setara 140,42 miliar USD atau tumbuh 13,82% *year on year* (yoy).

Industri Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan 13,94% (yoy) di tahun 2021. OJK terus mendorong penguatan posisi industri perbankan syariah di tengah persaingan perbankan melalui penerbitan berbagai ketentuan akselerasi transformasi digital disertai dengan sinergi perbankan. Total aset perbankan syariah mencapai Rp681,95 triliun.

Sementara aset Industri Keuangan Non-Bank syariah (IKNBS) tumbuh positif sebesar 3,90% (yoy) di tahun 2021. Total aset IKNBS mencapai Rp123,93 triliun.

Sedangkan Industri Pasar Modal Syariah menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp3.983,65 triliun, meningkat sebesar 19,10% (yoy) di tahun 2021.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyebutkan bahwa pertumbuhan keuangan syariah, terutama di masa pandemi, jauh lebih bagus dibandingkan dengan keuangan konvensional. Aset perbankan syariah di tahun sampai dengan Juni 2021 mampu tumbuh 15,8%, sedangkan bank konvensional tumbuh 8,07%. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah lebih unggul dengan pertumbuhan 16,54 persen yoy, sementara bank konvensional tumbuh 10,88 persen yoy.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG AKSELERASI

Penulis mencoba melakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong percepatan keuangan syariah, terutama di masa pandemi. Berikut ini penjelasannya.

1. Dukungan Pemerintah

   Pendirian KNEKS yang langsung dinahkodai oleh Presiden dan Wakil Presiden merupakan bukti

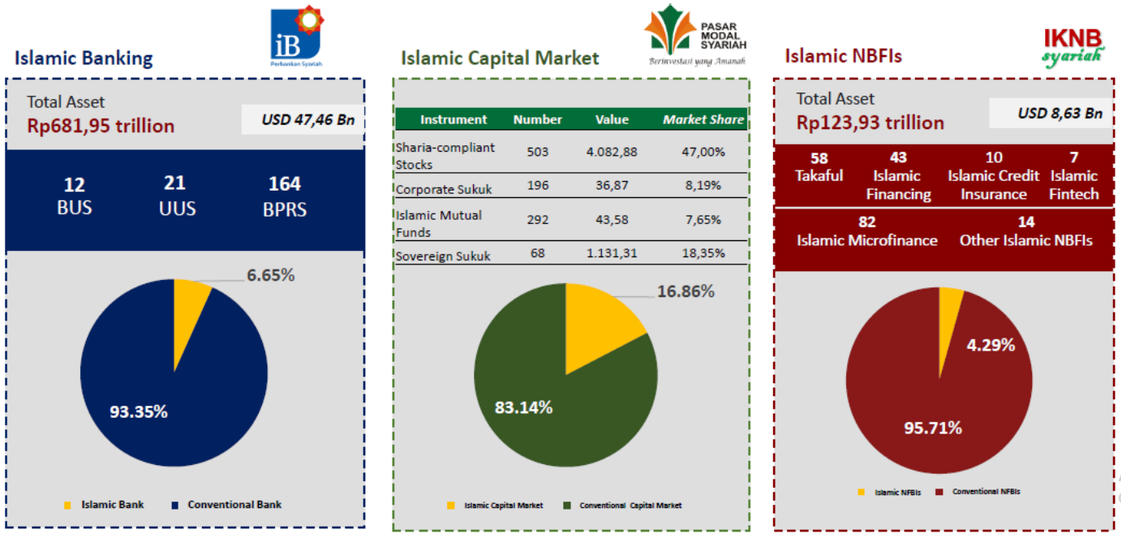

Sumber: OJK, 2022
Gambar 3 *Market Share* Industri Keuangan Syariah

bahwa keuangan syariah diharapkan berkembang semakin pesat. Keuangan syariah telah terbukti menjadi daya dorong bagi pembangunan ekonomi.

Pendirian KNEKS juga menjadi bukti bahwa keuangan syariah di Indonesia sudah bersifat *top down*, Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan keuangan syariah. Negara-negara yang mengembangkan keuangan syariah dengan model ini terbukti lebih cepat dalam mengakselerasi keuangan syariah. Contoh terdekat adalah Malaysia.

Adanya KNEKS mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. KNEKS bukan hanya mendorong sektor keuangan saja, tetapi juga industri halal, keuangan inklusif, UMKM, dan keuangan sosial (filantropi). Perkembangan sektor-sektor tersebut tentu akan berdampak terhadap akselerasi keuangan syariah.

Gambar 4 Indikator Ekonomi Islam Tingkat Global

Laporan dari State of Global Islamic Economy tahun 2021/2022 menunjukkan peringkat Indonesia terus mengalami peningkatan dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk keuangan syariah di dalamnya. Indonesia berada di peringkat 4, mendekati negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan ekonomi Islam.

2. Merger 3 bank syariah

   Penggabungan 3 bank syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan dampak terhadap akselerasi keuangan syariah di Indonesia.

   Merger 3 bank syariah tersebut memberikan dampak yang luas dari kuat, serta dukungan SDM dan teknologi digital, BSI diharapkan mampu menjadi *prime mover* di industri keuangan syariah.

   Pertumbuhan aset perbankan syariah, DPK, dan pembiayaan syariah di masa pandemi menunjukkan perkembangan yang bagus, diantaranya dimotori oleh BSI.

3. Penerapan Qanun LKS di Aceh

   Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejak tanggal 4 Januari 2019 telah menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan keuangan syariah di Aceh. Penerapan Qanun ini berdampak terhadap hijrahnya semua portofolio yang sebelumnya berada pada industri keuangan konvensional menuju industri keuangan syariah. Beberapa ekonom syariah menilai penerapan Qanun ini sangat berdampak pada akselerasi keuangan syariah hingga berbagai sisi. Merger ini berdampak pada efisiensi dan kemampuan berkompetisi, perluasan diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas dalam pembiayaan mega proyek, dan peningkatan kinerja keuangan (*economies of scale*). Merger ini juga meningkatkan kepercayaan nasabah baik di pasar nasional maupun global. Dengan dukungan modal yang makin solid, manajemen risiko yang lebih mampu mendorong *market share* aset keuangan syariah keluar dari lingkaran 5%.

   Dampak penerapan Qanun ini juga pada sisi yang lebih luas yakni ekonomi syariah. Masyarakat akan terus mengalihkan seluruh aktivitas, produk, dan lembaga keuangan, termasuk perbankan, pada syariat Islam dalam kurun waktu paling lama tiga tahun (2022) setelah Qanun diundangkan.

   Konversi menuju LKS ini, bukan tidak mungkin diikuti oleh daerah lain yang sejak awal sudah kental warna keislamannya, seperti Sumatera Barat. Kita berharap Bank Nagari yang sedang dalam proses konversi bisa segera bergabung dengan Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

4. Gaya hidup Islami *(Islamic life style)*

   Kemajuan teknologi informasi disamping mengandung sisi negatif, juga memiliki dampak positif yang besar. Saat ini masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya (milenial, gen z, senential, dst), semakin mudah mengakses dan menyebarluaskan pengetahuan Islami melalui internet. Hal ini berdampak pada semakin tingginya hasrat masyarakat untuk bergaya hidup Islami.

   Gaya hidup Islami tentu bukan hanya dari sisi makanan halal dan keuangan syariah saja. Saat ini gaya hidup Islami sudah berkembang ke arah pakaian, farmasi, kosmetik, bahkan wisata. Gaya hidup keuangan sosial yang telah lama berkembang di Indonesia seperti zakat, infaq, dan wakaf juga memiliki peran penting dalam akselerasi keuangan syariah. Ketika semua komponen gaya hidup ini bersinergi dalam keuangan syariah, maka akan menjadi pendorong luar biasa bagi akselerasi keuangan syariah.

Gambar 5 Beberapa Indikator Gaya Hidup Islami

Pada tahun 2021 Indonesia menempati Top 10 dalam kategori *Halal Food*, *Modest Fashion*, *Islamic Finance* dan *Pharma & Cosmetics* seperti pada Gambar 5 di atas. Kondisi ini di masa mendatang akan semakin baik dengan dukungan teknologi digital dan pemasaran secara elektronik (*e-commerce*).

PEMIKIRAN UNTUK AKSELERASI BERKESINAMBUNGAN

Keuangan syariah masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Akselerasi keuangan syariah harus terus dilakukan. Akselerasi ini dapat diselaraskan dengan ekonomi Indonesia yang diprediksi akan tumbuh terus hingga 2045. Harapannya Indonesia akan menempati peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia. Dengan kata lain, Indonesia dapat menjadi negara ekonomi muslim terbesar di dunia, termasuk dari sisi keuangan syariahnya.

Ada beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kebijakan yang mendorong akselerasi keuangan syariah.

1. Sosialisasi dan Edukasi berkelanjutan (literasi)

   Jika menggunakan pendirian Bank Muamalat sebagai tonggak dimulainya keuangan syariah di Indonesia pada 1991, maka di 2022 ini pengembangan keuangan Syariah telah berjalan selama 31 tahun. Menengok *market share* keuangan syariah yang belum mencapai 10% tentu kita sepakat jika mengatakan perkembangan keuangan syariah di Indonesia masih cukup lambat.

   Ahli keuangan Syariah banyak yang menilai bahwa peningkatan jumlah pengguna layanan keuangan akhir-akhir ini masih disebabkan pandangan adanya potensial profit. Masyarakat muslim Indonesia khususnya, belum semuanya beralih ke keuangan syariah karena loyalitas atau kesadaran akan adanya maqosid syariah. Masih sedikit yang menyadari bahwa penggunaan keuangan Syariah memiliki dimensi untuk penerapan sistem keuangan yang lebih adil dan bebas riba. Perwujudan masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera, dan adil pada tahun 2045 sangat selaras dengan maqosid syariah.

   Sosialiasi keuangan syariah hingga ke akar rumput secara terus menerus dan tanpa lelah, masih perlu dilanjutkan. Harapannya masyarakat benar-benar memahami hakikat keuangan Syariah kemudian turut menggunakan dan mengembangkannya.

   Perlu diingat juga bahwa keuangan syariah bukan keuangan ekslusif, milik umat Islam saja. Keuangan syariah adalah keuangan inklusif, milik umat manusia. Untuk itu pengembangan keuangan syariah jangan terpaku dengan jumlah penduduk muslim Indonesia saja. Saat ini sudah banyak masyarakat non-muslim yang juga memanfaatkan keuangan syariah dan ini perlu terus didorong.

   Pemanfaatan sarana teknologi informasi berbasis digital untuk melakukan edukasi secara masif juga perlu ditingkatkan.

2. Akselerasi Industri Halal

   Saat ini kita boleh bersyukur ekonomi Syariah Indonesia menempati urutan ke 4 secara global. Tentu kita tidak boleh berpuas diri, bahkan lengah. Dalam dunia yang terus berubah, berpuas diri sama saja dengan mempersilakan pihak lain untuk merebut posisi yang kita miliki. Oleh karena itu, kita tentu tidak boleh berdiam diri. Gunakan Teknik menyerang agar ekonomi Syariah Indonesia terus berkembang.

   Pengembangan keuangan Syariah tentu tidak terlepas dari berbagai industry yang yang ada dalam lingkup ekonomi Syariah. Pengembangan industri halal secara berkelanjutan tentu akan mendukung pengembangan keuangan Syariah.

3. Pengembangan ekonomi inklusif dan UMKM terus dikembangkan.

   Tujuan umum dari inklusi keuangan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Adanya inklusi keuangan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Peningkatan kesejahteraan itu diperoleh dari peningkatan usaha mereka yang didukung oleh pembiayaan dari sektor keuangan.

   Sayangnya kondisi di Indonesia saat ini masih penuh tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah. Indeks inklusi keuangan syariah juga masih 9,1 persen. Jauh tertinggal dari indeks nasional yang sudah mencapai 76,19 persen. Sementara itu, sebanyak 91,3 juta masyarakat masih belum tersentuh layanan finansial atau perbankan (*unbankable*) hingga saat ini.

   Masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan ini terutama adalah masyarakat golongan menengah ke bawah yang notabene adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat 62,1 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum terkoneksi dengan lembaga pembiayaan dan perbankan. Hal ini sempat membuat pemerintah kesulitan menyalurkan bantuan pembiayaan murah kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, UMKM yang belum tersentuh oleh industri keuangan rentan terlibat dalam *shadow banking* yang cenderung menggunakan sistem ribawi dan merugikan masyarakat.

Dengan memanfaatkan berbagai momentum yg dimiliki bangsa Indonesia, seperti bonus demografi, posisi geografi serta dukungan sumber daya alam yang melimpah, semoga keuangan syariah bisa menjadi pendorong tercapainya Indonesia emas 2045.

JENI WARDIN

Komunitas Literasi Julukana:

Gelorakan Budaya Literasi dan *Learning Organization*

Mengutarakan isi pikiran melalui tulisan memang tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Sekalinya seorang penulis menemukan teknik dan pola yang tepat, ide akan mengalir, dan tulisan akan jadi dalam waktu singkat. Menghasilkan tulisan yang tajam dan berbobot lain cerita: perlu penyesuaian cara berfikir dan keberanian berpendirian di luar atau bahkan berseberangan dengan arus utama. Sesuatu yang mungkin sulit dilakukan jika sang penulis berprofesi sebagai ASN di institusi yang diidentikkan dengan rantai komando yang tegas seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Membangun kemampuan menelurkan ide dan berpikir kritis di lingkungan birokratis inilah yang menjadi salah satu misi Halim Nuswantoro, Kasubbag Kepegawaian, Bagian Umum, Kanwil BC Sulbagsel ketika menggagas ide membangun sebuah komunitas literasi di tempat kerja barunya ketika itu. Berbekal pengalamannya sebagai pendebat ketika di bangku kuliah, ia meyakini bahwa ide-ide kreatif, keresahan-keresahan, dan pemikiran cemerlang yang terpendam akan tumbuh subur jika disemai di lingkungan yang tepat.

Gagasan ini mendapat sambutan hangat dari Kepala Bagian Umum Kanwil BC Sulbagsel, Lenni Ika Wahyudiasti: sosok yang produktif menulis buku dan juga menaruh perhatian sangat besar pada pengembangan literasi di Kementerian Keuangan. Bersama, mereka mengajak para pegawai Bea dan Cukai di wilayah

FOTO:
DOK. KOLINA

Sulawesi Bagian Selatan menggali potensi masing-masing di bidang kepenulisan, dan hasilnya tidak main-main. Sebuah buku mereka hasilkan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Jangan Mati Karena Pandemi. Itulah judul buku yang ditulis anggota Komunitas Literasi Julukana yang diluncurkan 18 November 2020. Berisi bunga rampai para penggawa Bea dan Cukai di wilayah kerja Kanwil DJBC Sulbagsel, buku ini berisi kisah-kisah inspiratif penulisnya menghadapi dan berefleksi di kepungan Pandemi Covid-19 yang ketika itu mulai menerpa. Dengan sudut pandang dan cara bertutur yang beragam, buku ini menjadi sebuah bukti bahwa budaya literasi bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sekilas tampak menjunjung tinggi keseragaman berfikir dan bertindak.

Julukana dalam bahasa Bugis Makassar berarti Seia-Sekata. Dalam nama Komunitas Literasi Julukana, ia merupakan akronim Jujur Unggul Lugas Kreatif dan Amanah. Sebuah nama yang seolah mewanti-wanti anggota komunitasnya: literasi yang tidak Jujur akan menjadi racun, jika tidak Unggul ia akan tenggelam, jika tidak Lugas ia hanya akan memusingkan, jika tidak Kreatif ia akan kehilangan ruhnya, dan jika tidak Amanah kepenulisan akan menyesatkan.

Berdirinya Komunitas Literasi Julukana (Kolina) ditandai dengan penandatanganan Piagam Peresmian pada tanggal 16 Juli 2020. Komunitas ini merupakan salah satu upaya menggelorakan budaya literasi dan *learning organization* di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan selaras dengan Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai "Menjadi Institusi Kepabeanan Terkemuka di Dunia".

Kolina aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi di lingkungan Kanwil BC Sulbagsel secara khusus, dan Kementerian Keuangan RI secara umum. Ada Milisi, sebuah *talkshow* yang mendatangkan pegiat literasi dan tokoh inspiratif dalam bidang kepenulisan dan bahasa. Sejak tahun 2020, Kolina telah terselenggara 17 'jilid'. Acara ini menjaring ratusan peserta setiap jilidnya, dan mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari jajaran pimpinan.

Di tahun 2020 mereka juga mengadakan lomba menulis essay inspiratif yang pesertanya berasal dari internal Kementerian Keuangan dan Mahasiswa PKN STAN. Karena tema lomba dan penyelenggaraannya yang baik, di tahun 2021 Kolina didapuk menjadi penyelenggara lomba menulis dalam rangka Hari Oeang RI ke 75.

Selain perlombaan, Kolina juga mengadakan workshop kepenulisan. Ketika menjaring tulisan untuk menerbitkan buku "Jangan Mati Karena Pandemi" di pertengahan 2020 lalu, misalnya, mereka mengadakan *workshop* khusus bagi para pegawai Bea dan Cukai Sulbagsel agar mereka yang berminat menyumbangkan tulisan memiliki wadah berkonsultasi mengenai tema dan teknik menulis mereka.

Berbeda dengan kepanjangan Julukana (Jujur Unggul Lugas Kreatif dan Amanah) yang tercipta sekejap mata, Komunitas Literasi Julukana dirintis lewat proses

yang berliku. "Kalau *lu* buka website-nya, nama yang tertera di sana itu Kolina-JECO, *Man*," teman saya Halim Nuswantoro membuka penjelasannya. Rekan berdebat semasa kuliah ini sangat bersemangat menjelaskan tentang Komunitas yang ia dan rekan-rekannya di Kanwil BC Sulbagsel bangun sejak 2020.

"Dua komunitas, Komunitas Literasi Julukana dan Julukana English Community (JECo), dulunya terpisah. Julukana English Community ada duluan. Kegiatannya menghadirkan guru bahasa Inggris untuk ngajarin teman-teman. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya penguasaan bahasa Inggrisnya cukup mumpuni, kami berfikir bagaimana caranya agar komunitas ini *self-sustained*," lanjutnya.

"Agak jauh hubungannya berfikir kritis dengan literasi ya, *Man*?" balas saya ikut-ikutan sapaan dia.

"Dekat *Man*. *Lu* aja yang kurang terbuka pikirannya," selorohnya. "Di Komunitas Literasi Julukana, literasi dibangun melalui beragam kegiatan. Komunitas ini aktif mengadakan lomba menulis essay, lomba pidato berbahasa Inggris, lomba menulis resensi buku, seminar dan lokakarya, serta *workshop* kepenulisan. Di ragam kegiatan itulah kemampuan berfikir kritis anggotanya diasah" lanjutnya menyangkutpautkan JECo dan Kolina.

Karena keterkaitan itulah, Julukana English Community dilebur menjadi satu ke dalam Komunitas Literasi Julukana. Kegiatan diskusi, berbahasa, dan menulis yang tadinya hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para pegawai Kanwil DJBC Sulbagsel, kini jadi bertujuan untuk meningkatkan literasi pegawai Bea dan Cukai di wilayah kerja Kanwil DJBC Sulbagsel.

Peleburan itu membuahkan hasil: jumlah pegawai Bea dan Cukai di wilayak kerja Kanwil DJBC Sulbagsel yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi seperti menulis, berdiskusi, dan berbicara di depan umum semakin banyak.

Tantangan Komunitas Literasi Julukana juga beragam. Salah satu yang paling dominan adalah terkait konsistensi. Semangat yang tinggi di awal keterlibatan beberapa orang anggota bisa menurun jika tidak dikelola dengan baik. Ke depannya komunitas ini berharap kegiatan-kegiatan yang sudah ada dapat dikembangkan lebih jauh lagi agar semangat anggotanya juga terjaga.

FOTO:
DOK. KOLINA

SHINTA PUTRI PERMATA DEWI
ALUMNI PROGRAM LINKAGE UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
DAN THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

Pengalaman Indah di Balik Segala Ketidakpastian

Dua bulan setelah saya melahirkan anak kedua, saya terbang 8 jam menuju Melbourne dengan membawa dua balita. Saya memilih repot ketimbang rindu, saya memilih berbagi pengalaman belajar di negeri orang bersama keluarga. Sebuah keputusan yang tidak pernah saya sesali.

Begitu mendarat di Bandara Tullamarine Melbourne, rasa haru saya rasakan setelah keberangkatan saya tertunda 1 tahun karena pandemi Covid-19. Beruntung, saya masih bisa merasakan belajar secara langsung di kampus University of Melbourne Parkville di semester akhir saya. Sebuah kejutan akhir tahun, di saat saya kira saya akan menghabiskan seluruh kuliah double degree saya secara online.

Universitas Indonesia

Saya mengikuti program beasiswa FETA Kementerian Keuangan pada tahun 2019. Saya mendapatkan 3 pilihan saat itu, magister luar negeri, linkage, dan dalam negeri. Saya pikir "*if I can't get both, why should choose one?*". Saya yang memiliki latar belakang S1 di kampus swasta, cukup penasaran dengan bagaimana rasanya masuk ke kampus negeri 5 besar di Indonesia. *Alhamdulillah,* ketika saya mendapat kesempatan untuk mencoba program linkage atau double degree tersebut, saya memilih Universitas Indonesia (UI) dan The University of Melbourne.

Keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Dosen yang ada di Fakultas Administrasi FIA UI merupakan para pakar di bidang administrasi publik yang mengetahui dinamika organisasi publik di lapangan. Apa yang didiskusikan di kelas cukup relevan dengan apa yang terjadi di Kementerian Keuangan. Setelah satu semester kami menjalani kuliah di Universitas Indonesia, saya mendapat tantangan cukup besar yaitu melakukan publikasi ilmiah dan tesis hanya dalam kurang dari 6 bulan saja. Tidak cukup dengan adanya dua target besar itu, saya harus menghadapi mual dan muntah cukup berat di trimester pertama kehamilan kedua saya. *But, I never know how strong I am until being strong is the only choice we have.*

Saya masih ingat harus meminta obat anti mual yang cukup keras dari dokter saya karena saya akan melakukan sidang tesis. Saya meneliti mengenai pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik, yang mana merupakan topik yang saya temui menarik dan sejalan dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas Kementerian Keuangan.

Ajaib, saya menikmati diskusi dalam sidang tesis saya, dan saya lulus dengan nilai maksimal. Satu gelar telah diraih, namun perjalanan masih berlanjut.

Border finally opened!

Desember 2021, satu minggu sebelum anak kedua saya lahir, Pemerintah Australia mengumumkan bahwa mereka mulai menerima mahasiswa internasional untuk dapat masuk ke negara tersebut. Semester berikutnya dimulai bulan Februari, sehingga saya hanya punya waktu kurang dari 2 bulan untuk mempersiapkan segalanya. Dimulai dengan mengurus paspor, saya menuju kantor imigrasi di saat anak saya masih berusia 2 minggu. Berlanjut mengurus asuransi, visa, tiket, sekolah anak, akomodasi, semua dikerjakan beberapa hari setelah saya melahirkan. Hal yang saya kira mustahil dan berat baik secara fisik, materi, maupun mental. Beruntung, banyak kemudahan dan bantuan yang saya terima.

Dua bulan setelah saya melahirkan anak kedua, saya terbang 8 jam menuju Melbourne dengan membawa dua balita. Saya memilih repot ketimbang rindu, saya memilih berbagi pengalaman belajar di negeri orang bersama keluarga. Sebuah keputusan yang tidak pernah saya sesali.

Begitu mendarat di Bandara Tullamarine Melbourne, rasa haru saya rasakan setelah keberangkatan saya tertunda karena pandemi Covid-19. Beruntung,

saya masih bisa merasakan belajar secara langsung di kampus University of Melbourne Parkville di semester akhir saya. Sebuah kejutan akhir tahun, di saat saya kira saya akan menghabiskan seluruh kuliah double degree saya secara online.

Kota Melbourne sangatlah nyaman bagi kami, keluarga kecil dengan 2 anak. Banyak taman dan lahan terbuka yang dapat dipakai anak-anak untuk bermain dan bereksplorasi. Kebanyakan yang tinggal di kota ini adalah pendatang / imigran, sehingga keluarga kami belajar menghargai perbedaan dan menikmati keberagaman. Dalam waktu satu bulan, anak pertama saya sudah cukup lancar berkomunikasi dengan teman sekolahnya dari berbagai negara. Sebagai muslim, untuk mencari makanan baik bahan baku mentah maupun masakan jadi yang halal cukup mudah. Semudah mencari orang Indonesia di Melbourne. Bahkan, saat jalan-jalan, sering saya temukan orang berbicara dalam Bahasa Indonesia di sudut kota Melbourne,

University of Melbourne

Hari pertama saya kuliah di University of Melbourne (Unimelb), banyak hal yang harus saya sesuaikan terutama partisipasi di kelas. Jika perkuliahan di Indonesia, sebagian besar (80%) kita mendengarkan guru mengajar dan sisanya (20%) kita tanya jawab. Berbeda di Unimelb, 80% berisi diskusi dan presentasi dari mahasiswa, bahan bacaaan diberikan sebelum kelas, dosen hanya menambahkan dan menjawab pertanyaan hasil elaborasi diskusi dan bacaan kita. Hal yang saya pahami bahwa belajar di program magister ini kita belajar bagaimana berpikir, istilah dosen saya "*we teach you how to think*".

Semua orang diberi kesempatan luas untuk dapat memberikan pendapat dalam forum diskusi. Hari pertama saya kuliah secara luring yang cukup berkesan adalah kelas *Governance.* Kelas untuk mata kuliah ini bersifat intensif. Jadwal hanya 6 kali kelas dalam satu semester, satu kali kelas terjadwal selama 8 jam sejak jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Dalam satu hari, kelas

bisa mengadakan diskusi minimal 6 kali. Seperti biasa, saya memilih duduk di salah satu *round table* dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Dosen saya langsung meminta kami untuk berpindah dan memencar agar bisa berdiskusi dengan teman *Australian native* yang lain atau dari negara yang berbeda dengan kita.

Meski awalnya terasa berat, namun ternyata keterpaksaan kami untuk aktif dan beradaptasi dengan teman yang baru, menjadikan saya belajar banyak hal. Cara pikir teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda dengan saya, pastinya memiliki masukan dari sudut pandang yang tidak terpikirkan oleh saya. Saat itu kami diskusi tentang bagaimana proses demokrasi pada negara komunis. Jujur, saya tidak terpikirkan satupun solusi, namun teman-teman lain begitu kreatif. Dari mulai berbicara mengenai fungsi kelompok agama yang cukup berpengaruh dalam sebuah negara, hingga NGO internasional yang bisa memengaruhi kebijakan negara tersebut jika mekanisme *bottom up* tidak dapat dijalankan. Sebuah cara pandang unik dan memperkaya cara pikir saya pribadi.

Untuk membuat tulisan yang baik, kami juga mendapatkan *feedback* yang sangat komperehensif. Dosen dapat kita hubungi kapan saja kita mau melalui email maupun membuat janji untuk konsultasi secara langsung. Tidak hanya kerangka berpikir kita yang diberi masukan, bahkan hal kecil seperti grammar dan cara sitasi yang baik juga diperhatikan dengan detail. Hal ini merupakan salah satu keunggulan sistem pendidikan di luar negeri, dibanding saat saya menempuh pendidikan di dalam negeri yang hanya memberi nilai akhir denngan *feedback* yang saya rasa kurang komperehensif.

Akhir yang manis

Cukup banyak kejutan dalam perjalanan saya menempuh pendidikan magister kali ini. Mulai dari pandemi covid-19 yang membuat saya harus tesis di semester kedua, menjalani separuh perjalanan kuliah saya secara online, di dalam kondisi lemah saat hamil dan melahirkan. Di awal perjalanan, saya kira saya bahkan tidak dapat menyelesaikan tantangan belajar kali ini. Ternyata di luar dugaan saya, saya bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, mendapat penghargaan lulusan terbaik FIA UI, dan lulus dari University of Melbourne dengan hasil akhir maksimal yaitu grade *first class honours.*

Meski perjalanan tidak mulus, tapi saya memiliki *supporting system* yang sangat membantu saya. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pegawai Kementerian Keuangan, terutama para wanita yang sudah menjadi istri dan Ibu seperti saya. Bahwa status dan amanah kita dalam ranah rumah tangga bukan menjadi hambatan kita untuk tetap menggapai cita-cita. Ada salah satu kata bijak yang saya suka, ýou *were someone before you are their mother, and that person still matters.* Kita tidak boleh melupakan siapa diri kita meski kita sudah menjadi Ibu, meskipun pastinya ada banyak hal yang kita sesuaikan demi keluarga dan anak-anak.

GALUH ARIELIYNA ANGGRAENI S.

CEGAH *STUNTING* SEDINI MUNGKIN

APA ITU *STUNTING*???

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usia seharusnya. (P2PTM Kemenkes RI, 2018), pengertian lain dari stunting menurut Pemnag Kurai Taji Timur, 2019 adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

PENYEBAB *STUNTING*

Penyebab utama *stunting* adalah malnutrisi dalam jangka panjang (kronis) atau Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.

Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. (Rokom, 2018).

GEJALA *STUNTING*

Gejala stunting sering tidak disadari, karena anak hanya diduga memiliki tubuh yang pendek. Meski demikian, gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun.

Gejala yang menunjukkan anak mengalami stunting adalah:

1. Tubuh anak lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan anak seusianya.
2. Berat badan anak bisa lebih rendah untuk anak seusianya.
3. Pertumbuhan tulang terhambat.
4. Mudah sakit.
5. Gangguan belajar.
6. Gangguan tumbuh kembang.

PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pesan **ABCDE** bebas *stunting*

(A) Aktif minum Tablet Tambah Darah (TTD)

Konsumsi TTD bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali.
Konsumsi TTD bagi Ibu hamil 1 tablet setiap hari (minimal 90 tablet selama kehamilan)

(B) Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali

Periksa kehamilan minimal 6 (enam) kali, 2 (dua) kali oleh dokter menggunakan USG

(C) Cukupi konsumsi protein hewani

Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan

(D) Datang ke Posyandu setiap bulan

Datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan (timbang dan ukur) dan perkembangan, serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan

(E) Eksklusif ASI 6 bulan

ASI ekslusif selama 6 bulan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. (Kemkes, 2022)

IRFAN RAMDANI
M. SAID RAMADHAN

Mengintip Surga Dunia di Sulawesi Utara

Sulawesi Utara merupakan ujung dari pulau Sulawesi yang menawarkan pesona wisata alam yang sangat indah. Bunaken lebih familiar di telinga masyarakat luas sebagai *icon* wisata Sulawesi Utara dengan keindahan bawah laut yang mempesona. Namun, ternyata terdapat banyak lokasi wisata yang dapat dikunjungi yang tidak kalah mempesona dari Bunaken di Bumi Nyiur Melambai ini. Perpaduan bukit dan pantai di Bumi Nyiur Melambai ini memberikan banyak pilihan lokasi wisata laut yang mempesona dan bukit-bukit yang indah seperti bukit *Teletubbies* yang dipenuhi dengan udara segar dan hijaunya rumput merupakan surga tersembunyi yg akan membuat kita betah di Manado. Untai cerita ini menawarkan pesona Sulawesi Utara yg tidak sepantasnya kita lewatkan. Jadi jangan ragu utk berpetualang di bumi Nyiur Melambai. Berikut rekomendasi surga tersembunyi di Bumi Nyiur Melambai :

PANTAI PAAL

Pantai Paal merupakan salah satu objek wisata di Likupang, Sulawesi Utara. Saat berkunjung ke sini, kamu akan menemukan pantai dengan pasir putih halus yang bersih di bibir pantai dan laut berwarna biru kehijauan yang indah sebening kristal.

Pantai Paal juga merupakan lokasi yang strategis untuk para *sunset hunter* dikarenakan selain pantainya yang sangat indah juga merupakan lokasi yang strategis untuk menikmati suasana sore hari didampingi goroho (pisang goreng dimakan dengan sambal) dan saraba (minuman jahe hangat khas Sulawesi).

Untuk fasilitas yang disediakan Pantai Paal saat ini sudah cukup mumpuni meskipun terbilang objek wisata baru. Beberapa fasilitas yang bisa didapatkan di pantai ini antara lain seperti rumah panggung, toilet, dan lahan parkir yang luas di antara pepohonan beralaskan pasir putih sudah tersedia juga tidak lupa terdapat warung-warung yang berjualan diantara. Pantai Paal juga merupakan pantai utama dan unggulan dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang.

Selain terdapat pantai yang indah, objek wisata ini turut membantu perekonomian warga sekitar dikarenakan banyak warga yang membuka warung, menyediakan air bersih untuk toilet, menyediakan sarana bermain seperti banana boat dan UFO boat, dan menyewakan rumah panggung di tepi pantai.

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Pantai Paal

Lokasi Pantai Pall tidak jauh dari BDK Manado, berjarak sekitar 45 km dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 30 menit perjalanan dan dikarenakan lokasinya yang tidak terlalu jauh lokasi ini hampir selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri.

PULAU LIHAGA

Pulau Lihaga masuk dalam daftar destinasi super prioritas oleh Kemenparekraf, lokasinya yang indah menjadikannya terkenal di dalam dan luar negeri.
Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni dengan hamparan pasir laut putih yang sangat lembut dan air laut yang sangat jernih sejernih kristal, meskipun tidak berpenghuni fasilitas dalam pulau ini sudah mumpuni mulai dari cafe, toilet, tempat ibadah, dan jasa penyewaan alat untuk *snorkeling atau diving* sudah tersedia.

Dengan pesona air laut yang sangat bening, maka akan sangat disayangkan bila hanya dipandang oleh wisatawan. Wisatawan dapat menyewa alat apabila tidak memiliki peralatan untuk menikmati keindahan bawah laut pulau Lihaga, namun untuk dapat menikmati pesona bawah laut ini wisatawan harus berkunjung pagi hari karena air akan surut pada siang sampai sore hari.

Untuk lokasinya, tak sulit sebenarnya ke pulau Lihaga. Lokasinya berada di wilayah Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Sekitar 40 km dari BDK Manado dengan waktu tempuh kira-kira 1 jam 20 menit menuju Pelabuhan Serei dan dilanjutkan dengan menggunakan perahu untuk menyeberang ke lokasi wisata tersebut.

Wisatawan dapat menyeberang menggunakan perahu ke pulau tersebut melalui pelabuhan Munte atau pelabuhan nelayan Serei. Untuk jasa penyeberangan dapat menyewa perahu nelayan sekitar atau menggunakan kapal yang disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk mendorong wisata ke pulau Lihaga menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Munte dengan terlebih dahulu melakukan registrasi ke pihak pelni untuk dapat masuk kedalam daftar tunggu keberangkatan, kapal Pelni tersedia setiap hari Sabtu pukul 9.00 WITA dan kembali pada 16.00 WITA, untuk informasi registrasi lebih lanjut dapat menghubungi akun Instagram @Pelni162.

Pulau Lihaga

POINT OF INTEREST

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Tanjung Silar

TANJUNG SILAR

Tanjung Silar terletak di kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau biasa disebut juga dengan Boltim. Keindahan pemandangannya sudah akrab di telinga warga sekitar dan turis asing, hingga apabila anda berkunjung di waktu weekend maka akan sangat padat orang yang berkung ke lokasi ini.

Salah satu daya tarik Pantai Tanjung Silar adalah hamparan pasirnya yang begitu putih serta air lautnya yang sangat jernih, dan ketika wisatawan mengunjungi lokasi wisata ini, wisatawan juga turut merasakan kesegaran dari udara yang masih sangat alami saat menuju lokasi dan disekitar lokasi wisata.

Tanjung Silar memiliki salah satu sudut yang bentuknya menyerupai teluk. Titik ini diapit oleh dua tebing batu karang dengan ketinggian kurang lebih sekitar 20 meter. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya mirip Pantai Navagio di Yunani. Lokasi ini menjadi *spot* favorit para pengunjung untuk berfoto-foto bersama keluarga, rekan kerja, pasangan dan bahkan sering digunakan sebagai objek *prewedding* pengantin.

Perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi yang eksotis tersebut cukup panjang sekitar 4-5 jam dari BDK Manado. Setelah itu, masih dibutuhkan 30 menit ekstra untuk sampai di Desa Jiko. Selanjutnya, pengunjung bisa membayar 150 ribu untuk menyewa perahu nelayan dengan kapasitas maksimal 5 orang dan diantar ke Tanjung Silar.

BUKIT LARATA

Bukit Larata merupakan bukit cantik ini terletak disebelah timur laut dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Utara. Objek wisata Bukit Larata sendiri merupakan sebuah tempat wisata yang terletak diantara sebuah bukit bernama Bukit Larata yang berada di Desa Kinunang.

Bukit ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 45 meter diatas permukaan laut. Wisatawan tidak diberikan fasilitas apapun ketika berada di Bukit Larata yang disajikan diatas puncak Bukit Larata hanyalah keindahan bukti dan lautan yang terlihat dari atas bukit tersebut dengan kondisi puncak masih sangat alami, untuk saat ini belum pembangunan infrastruktur yang menunjang tetapi telah tersedia lokasi untuk parkir mobil dan motor.

Puncak Bukit Larata memiliki pemandangan yang sangat menarik, wisatawan akan disuguhi perpaduan antara hijaunya bukit yang luas, birunya langit dan laut biru yang membentang didepan mata wisatawan, serta pemandangan langsung ke Gunung Dua Sudara, angin yang berhembus menciptakan sensasi padang rumput dan ilalang yang bergoyang ditambah dengan sejuknya udara disekitar membuat daya tarik tersendiri ketika mengunjungi Bukit Larata terutama disore dengan pesona sunset yang memukau.

Lokasi Bukit Larata berada 48 km dari BDK Manado, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Medan untuk dapat menaiki menaiki Bukit Larata cukup licin jadi pastikan wisatawan membawa sepatu yang sesuai untuk jenis medan ini, tetapi akan terbayar dengan keindahan yang memukau ketika sudah berhasil mencapai puncak.

Bukit Larata

Danau Linow

DANAU LINOW

Berjarak 38 km dari BDK Manado dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 20 menit perjalanan, Danau Linow dapat ditempuh 3 km arah ke barat dari Kota Tomohon. Selama perjalanan, kita disajikan pemandangan hijau dari perbukitan yang ditumbuhi pepohonan besar dengan udara yang sejuk sepanjang perjalanan. Dalam perjalanannya wisatawan jg dapat menikmati keindahan Gunung Lokon dari jauh.

Pesona Danau Linow dapat dirasakan ketika pengunjung hendak mencapai lokasi wisata ketika dalam perjalanan pun sudah disampai dengan udara alam yang sejuk dan pesona alam yang asri ini pun yang akan dirasakan ketika mencapai lokasi wisata Danau Linow dengan pemandangan danau yang memukau yang dikenal dengan danau 3 warna dimana terkadang danau ini berwarna hijau pekat, namun berapa jam kemudian ada perubahan. Dimana warna hijau bercampur biru dan putih lebih mendominasi. Disamping pesona danau yang sangat memukau tersebut pengunjung tidak diperbolehkan berenang di danau yang mempersona ini, dikarenakan kandungan belerang danau cukup tinggi.

Fasilitas yang disajikan Danau Linow ini sudah semakin lengkap, seperti lahan parkir yang luas, tempat ibadah, dan kantin yang menjual banyak makanan yang variatif mulai dari makanan berat hingga makanan ringan seperti pisang goroho serta makanan khas lainnya, tersedia minuman hangat untuk menemani pengunjung menikmati indahnya Danau Linow.

GALERI

MAKASSAR

KAWASAN CENTRE POINT OF INDONESIA

Kawasan Centre Point of Indonesia merupakan kawasan wisata kota yang menjadi ikon baru Kota Makassar yang tidak hanya indah, tetapi juga berkesan eksotik. Centre Point of Indonesia sekaligus menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai titik tengah Indonesia.

TEBING APPARALANG

Tebing Apparalang merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh sekitar 190 kilometer atau sekitar 5 jam perjalanan dari Pusat Kota Makassar.

FOTO:
NURMIATI
BDK MAKASSAR

HAMPARAN PERSAWAHAN

Hamparan persawahan yang ditemui disepanjang perjalanan sekitar maros-makassar.

BAJU BODO

Baju bodo merupakan pakaian adat Suku Bugis-Makassar yang khusus dipakai untuk perempuan. Baju bodo biasanya digunakan sebagai pakaian kebesaran pada acara adat maupun acara-acara tertentu.

ISSN: 2086-4833